STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2024

SOP BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEM	1IK DAN KEMAHASISWAAN
© 2024 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) I	nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Cetakan I, 2024	
Diterbitkan oleh:	
LOGO IAIN	
Institut Agama Islam Negeri Manado	
JI. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Sulawesi Utara INDONESIA	Telp.: +62431 860616 Fax.: +62431 850774 humas@iain-manado.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Kode dokumen : 0000514000

Revisi ke- : 1

Tanggal : 25 Maret 2024

Diajukan oleh : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan

Dr. Salma, M.HI

Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

AN AGA

Dr. Mutmainah, M.Pd

Disetujui oleh

TIM PENYUSUN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Pelindung : Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

Penanggung Jawab : Dr. Salma, M.HI

Pengarah : 1. Dr. Edi Gunawan, M.HI

2. Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag

Ketua : Dr. Mutmainah, M.Pd

Sekretaris : Rhyan Prayuddy Reksamunandar, M.Si

Anggota : 1. Mahdi, SE., M.Si

2. Nova Alam, M.Pd

3. Muhammad Yusuf, S.Kom.I

4. Jeane Ivone Sondak, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Manado ini dapat diselesaikan.

Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya dan tenaga yang minimal dan rasional. SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para akademisi atau pegawai sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan.

Dalam konteks IAIN Manado, secara umum tujuan dari SOP yang disusun ini adalah adalah untuk agar sivitas akademika, terutama dosen dan tenaga kependidikan di IAIN Manado dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja seluruh personal dalam organisasi atau unit kerja. Disamping itu SOP ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi serta memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari individu pada masingmasing unit kerja. Hal penting dari penyusunan SOP ini juga bertujuan untuk melindungi organisasi (unit) kerja dan semua stakehoder internal dari kesalahan administrasi lainnya, kemudian menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi dalam pekerjaan.

Sebagai pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada masing-masing unsur yang sudah terlibat dalam penyusunan dan pembaharuan SOP ini, mudah-mudah semua program kerja dan implementasinya didasarkan kepada langkah-langkah sebagaimana tertera di dalam SOP ini. Semoga Allah swt memberkahi kita semua. Aamiin.

Manado, Maret 2024

Mund of s

Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI NIP. 198404142009011012

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	iii
Tim Penyusun	i۷
Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Surat keputusan rektor	4
Daftar SOP	6
SOP Peminjaman Kendaraan Dinas	8
SOP Pengelolaan Surat Masuk	9
SOP Pendistribusian Barang	11
SOP Pengelolaan Sarana Prasarana	12
SOP Penghapusan Sarana Prasarana Milik Negara	14
SOP Perbaikan dan Pergantian Sarana Prasarana	16
SOP Pemeliharaan Kebersihan	17
SOP Satuan Pengamanan	18
SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	19
SOP Pembuatan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)	20
SOP Mutasi Pegawai	21
SOP Penetapan Angka Kredit Dosen	22
SOP Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Akademik Dosen	23
SOP Penerbitan SK Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Dosen	24
SOP Pencatatan Surat Masuk	25
SOP Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	
	26
SOP Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)	27
SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Kegiatan	28
SOP Mutasi Antar Instansi	29
SOP Mutasi Kenaikan Pangkat	30
SOP Pelantikan Pejabat	32
SOP Pemberian Cuti	34
SOP Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	35
SOP Pembuatan SPMT dan SPMJ Fungsional	36
SOP Pembuatan Kartu Taspen	
SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian	
SOP Penerbitan Surat Tugas	39
SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	40
SOP Penerbitan SK Pengangkatan CPNS	41
SOP Penerbitan SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan Lektor	42
SOP Penerbitan SK Pengangkatan PNS	43
SOP Penerbitan Surat Perjalanan Dinas	44
SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	46
SOP Pengelolaan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	47
SOP Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	49
SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Peraturan-peraturan dan Pedoman-pedoman	50
SOP Pengajuan Permohonan Surat Ijin Belajar S2 dan S3	52
SOP Pengajuan Permohonan Surat Tugas Belajar S2 dan S3	53
SOP Pelayanan Legalisir SK-SK Kepegawaian	54
SOP Rekapitulasi Absen Bulanan	55

SOP Seleksi Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	56
SOP Penerbitan SK Ijin Belajar S1	59
SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Tim Pembentukan Kepanitiaan	60
SOP Pengajuan Pensiun	62
SOP Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan	65
SOP Permohonan Pencairan Operasional Fakultas, Unit, dan Lembaga	66
SOP Permohonan Pencairan Anggaran Vakasi	67
SOP Permohonan Pencairan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas	68
SOP Permohonan Pencairan Anggaran Pemeliharaan Gedung	69
SOP Permohonan Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas	70



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO NOMOR: 277 TAHUN 2021

STANDAR OPERASIONAL BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertibnya administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang akademik, maka perlu disusun standar operasional prosedur bidang akademik Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri Manado.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado.
- 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satuan Kerja Untuk Atas Nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG

STANDAR OPERASIONAL BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN

KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.

Pertama : Menetapkan Standar Operasional Biro Administrasi, Umum dan Akademik dan

kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam

keputusan ini.

Kedua : Standar Operasional Biro Administrasi, Umum dan Akademik dan kemahasiswaan

Institut Agama Islam Negeri Manado merupakan standar dalam melaksanakan tugas di bidang akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Institut

Agama Islam Negeri Manado.

Ketiga : Standar Operasional Biro Administrasi, Umum dan Akademik dan kemahasiswaan

Institut Agama Islam Negeri Manado, harus dilakukan evaluasi maksimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan revisi dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Manado, 01 Septermber 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

NIM 198404142009011012

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO NOMOR:

TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

NO	NAMA SOP	KODE DOKUMEN
1	SOP Peminjaman Kendaraan Dinas	000314001
2	SOP Pengelolaan Surat Masuk	000314002
3	SOP Pendistribusian Barang	000314003
4	SOP Pengelolaan Sarana Prasarana	000314004
5	SOP Penghapusan Sarana Prasarana Milik Negara	000314005
6	SOP Perbaikan dan Pergantian Sarana Prasarana	000314006
7	SOP Pemeliharaan Kebersihan	000314007
8	SOP Satuan Pengamanan	000314008
9	SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	000314009
10	SOP Pembuatan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)	000314010
11	SOP Mutasi Pegawai	000314011
12	SOP Penetapan Angka Kredit Dosen	000314012
13	SOP Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan	000314013
	Akademik Dosen	
14	SOP Penerbitan SK Pembebasan Sementara Dari Jabatan	000314014
	Fungsional Dosen	
15	SOP Pencatatan Surat Masuk	000314015
16	SOP Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit	000314016
17	SOP Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)	000314017
18	SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Kegiatan	000314018
19	SOP Mutasi Antar Instansi	000314019
20	SOP Mutasi Kenaikan Pangkat	000314020
21	SOP Pelantikan Pejabat	000314021
22	SOP Pemberian Cuti	000314022
23	SOP Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	000314023
24	SOP Pembuatan SPMT dan SPMJ Fungsional	000314024
25	SOP Pembuatan Kartu Taspen	000314025
26	SOP Pemuktahiran Database Kepegawaian	000314026
27	SOP Penerbitan Surat Tugas	000314027
28	SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Penetapan	000314028
	Penerimaan Sertifikasi Dosen	
29	SOP Penerbitan SK Pengangkatan CPNS	000314029
30	SOP Penerbitan SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan Lektor	000314030
31	SOP Penerbitan SK Pengangkatan PNS	000314031
32	SOP Penerbitan Surat Perjalanan Dinas	000314032
33	SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	000314033
	(SIMPEG)	
34	SOP Pengelolaan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	000314034
35	SOP Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	000314035
36	SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Peraturan-	000314036
	peraturan dan Pedoman-pedoman	
37	SOP Pengajuan Permohonan Surat Ijin Belajar S2 dan S3	000314037

38	SOP Pengajuan Permohonan Surat Tugas Belajar S2 dan S3	0003140378
39	SOP Pelayanan Legalisir SK-SK Kepegawaian	000314039
40	SOP Rekapitulasi Absen Bulanan	000314040
41	SOP Seleksi Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana	000314041
	Karya Satya	
42	SOP Penerbitan SK Ijin Belajar S1	000314042
43	SOP Penerbitan Keputusan Rektor Tentang Tim Pembentukan	000314043
	Kepanitiaan	
44	SOP Pengajuan Pensiun	000314044
45	SOP Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan	000314045
46	SOP Permohonan Pencairan Operasional Fakultas, Unit, dan	000314046
	Lembaga	
47	SOP Permohonan Pencairan Anggaran Vakasi	000314047
48	SOP Permohonan Pencairan Anggaran Pemeliharaan	000314048
	Kendaraan Dinas	
49	SOP Permohonan Pencairan Anggaran Pemeliharaan Gedung	000314049
50	SOP Permohonan Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas	000314050



Nomor SOP	000314001			
Tanggal Pembuatan	25 April 2016			
Tanggal Revisi	18 Juni 2021			
Tanggal Efektif	1 Januari 2022			
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang			
	Administrasi Umum,			
	Perencanaan, dan Keuangan			
	Dr. Salma, M.Hi			
	NIP. 196905041994032003			
	NIF. 190900041994032003			

SOP PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum:

Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara ;

Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara

Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

Keterkaitan:

Peminjam/Pengguna Kabag. Umum Kasubbag TU, PRT

Peringatan:

Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi selama masa pemakaian

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Pejabat/Dosen/Karyawan IAIN Manado
- 2. Mahasiswa IAIN Manado
- 3. Organisasi yg berkaitan dengan kampus

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Kendaraan
- 2. Kunci Kendaraan
- 3. STNK

- 1. Surat Dinas/ Permohonan
- 2. Data Base Barang
- 3. Perawatan Rutin

		Pelak	sana		Mutu Buku	Ket	
No	Aktifitas	Pemakai	Bagian Umum	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemakaian Kendaraan Dinas ke Rektor mealui Kabag Umum			Surat Permohonan	5 menit	Terdistribusi ke Rektor	
2	Memeriksa ketersediaan kendaraan dinas			Surat Permohonan dan Ketersediaan Kendaraan	30 menit	Tersediannya Kendaraan	
3	Memberikan pinjaman kendaraan dinas sesuai permohonan		-	Surat di setujui, kendaraan tersedia	5 menit	Disetujui	
4	Menggunakan kendaraan dinas dan mengembalikannya setelah selesai			Melapor kepada Kabag Umum	5 menit	Laporan penggunaan kendaraan	



Nomor SOP	000314002
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum:

- UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Departemen Agama 72/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado

Keterkaitan:

Semua SOP yang ada di Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Peringatan:

- JFU Pencatat surat masuk agar melakukan pemilahan berdasarkan sifat surat (biasa, penting, rahasia maupun segera), dalam hal tidak dilaksanakan akan menghambat pemrosesan surat masuk.
- Perjalanan surat masuk yang memerlukan tindaklanjut agar ditulis dalam buku kendali surat masuk atau database surat masuk untuk mempermudah pencarian

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan surat masuk dan surat keluar Pegawai pada Bagian OKH

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Printer dan mesin foto copy Buku kendali dan barang habis pakai (pensil, bolpoint, penghapus, stepler, remover dll)

- 1. Data Surat Masuk
- 2. Catatan surat masuk
- Arsip Surat Keluar

		Pelaksana			Mutu Buku	<u> </u>			
No	Aktifitas	JFU Pengad mini strasi	Kepala Bagian OKH	Kasubb ag OKH	Kepala Biro AUK/AA KK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima, mencatat dan memberikan lembar disposisi surat masuk dari bagian, unit, Fakultas dan dinas terkait					Kartu kendali Disposisi	5 Menit	Berkas surat masuk diterima	
2	Membaca, mendisposisikan kepada para Kasubbag. OKH sesuai dengan sifat surat dan tanggungjawabnya	<u> </u>				Buku agenda File data surat masuk	7 Menit	Berkas surat masuk sudah tercatat dan diserahkan kepada Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	
3	Mencermati, untuk menindaklanjuti disposisi atasan langsung, serta meneruskan kepada JFU untuk disimpan sbg arsip atau proses lebih lanjut					Berkas surat masuk	10 Menit	Surat masuk telah diberi disposisi	
4	Mengerjakan proses lanjutan surat dimaksud, menyerahkan kembali kepada Kasubbag. bila pekerjaan selesai					Disposisi Kabag. OKH	5 Menit	Surat masuk telah diserahkan kepada Kasubbag. OKH	

5	Menyerahkan konsep surat jawaban kepada atasan langsung			Disposisi Kabag. OKH	10 Menit	Surat masuk ditindaklanjuti dan diselesaikan	
6	Memberi putusan persetujuan, dan menandatangani surat jawaban atau memberi paraf, meneruskan pada pejabat untuk memintakan tanda tangan			Disposisi Kasubbag. OKH	15 Menit	Konsep jawaban/tindaklanjut telah dibuat	
7	Memberi putusan persetujuan, dan menandatangani surat jawaban atau memberi paraf, meneruskan pada pejabat untuk memintakan tandatangan			Konsep Jawaban /tindaklanjut yang telah dibuat	10 Menit	Jawaban/tindaklanjut surat masuk telah diparaf dan diteruskan kepada Pejabat berwenang	
8	Memberi putusan persetujuan dengan menandatangani surat dimaksud			Surat jawaban yang telah diparaf	15 Menit	Informasi keberadaan surat Jawaban/tindaklanjut	
9	Menerima surat yang telah ditandatangani, lalu menyerahkan kepada JFU untuk diproses selanjutnya	-		Surat jawaban/tindak lanjuti yang telah diparaf pejabat terkait	5 Menit	Surat Jawaban/tindaklanjut telah ditandatangani	
10	Menggandakan,dan memproses pengiriman surat keluar berdasarkan alamat/tujuan surat			Surat jawaban yang telah ditandatanga ni dan amplop dan stempel dinas	5 Menit	Disposisi	
11	Selesai			File	30 Menit	Surat keluar yang sudah siap dikirim	



Nomor SOP	000314003
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	1411 . 19090304 1994032003

SOP PENDISTRIBUSIAN BARANG

Dasar Hukum:

- Permenkeu Nomor 78/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Pemenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- 3. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- 7. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Kete	rka	itan:

Peringatan:

Barang diterima selambat-lambatnya sesuai waktu yang di tetapkan setelah permohonan diajukan dan apabila disetujui.

Kualifikasi Pelaksana:

Mematuhi Perundang-undangan. Memahami tata cara distribusi barang inventaris

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

		Pelak	sana		Mutu Buku		Ket
No	Aktifitas	Pemakai	Bagian Umum	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permintaan barang ke kepala bag. Umum dan RT dengan spesifikasi barang secara lengkap			Surat Permohonan, Data Barang	5 menit		
2	Memverifikasi kelayakan barang yang di minta dan kesesuaian permintaan barang				60 menit	Barang terverifikasi	
3	Memeriksa ketersediaan barang di gudang persediaan		—		60 menit		
4	Membuat <i>delivery order</i> barang tersebut telah tersedia			Daftar barang	15 menit		
5	Permohonan dari unit kerja mengambil barang yang diminta dengan menunjukkan <i>delivery</i> <i>order</i>					Terlaksana	



Nomor SOP	000314004
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	,
	NIP. 196905041994032003

SOP PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Dasar Hukum:

- Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 2. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- 3. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- 7. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Keterkaitan:

- SOP Pengadaan Barang Dan Jasa
- SOP Perpanjangan Surat Kendaraan Dinas (STNK)
- SOP Penginputan dan Pelaporan SIMAK BMN
- SOP Penghapusan BMN

Peringatan:

- Apabila tidak Melakukan SOP ini penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana. maka akan menghambat aktivitas penata usahan BMN
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan keterlambatan dan menunda pencatatan dalam aplikasi simak BMN dan menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas kantor.

Kualifikasi Pelaksana:

Pejabat bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Laptop
- 2. Printer
- 3. ATK

Pencatatan dan Pendataan:

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana

		Pelaksana					Mutu Buku		
No	Aktifitas	Unit	Bagian Sarpras	Bagian Inventari s	Bagian Umum	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima sarana prasarana					Sesuai ketentuan	5 menit	diterima	
2	Menginput dan memberi nomor barang ke dalam daftar inventaris					Kesesuaian data	15 menit	terimput	
3	Membuat daftar pendistribusian barang				—	Adanya daftar penditribusian	30 menit	terdaftar	
4	Persetujuan pendistribusian barang						15 menit	Disetujui	

5	Mendistribusikan barang ke Unit	•	 		Kesesuaian barang	1 hari	terdistribusi	
6	Memantau barang setiap 6 bulan					1 hari		
7	Menerima laporan kerusakan barang				Data, fisik	15 menit		
8	Menyimpan barang yang rusak ke gudang				Data, fisik	30 menit		
9	Memperbaiki barang yang rusak				Data, fisik	1 hari		



Nomor SOP	000314005
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 19090504 1994052005
	1

SOP PENGHAPUSAN SARANA PRASARANA MILIK NEGARA

Dasar Hukum:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 4. Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 6. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- 7. Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- 11. Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Keterkaitan:

Keterkaitan

BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Peringatan:

- Sarana prasarana telah rusak dan tidak layak dipergunakan kembali
- Sarana prasarana sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada

Kualifikasi Pelaksana:

- Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara
- 2. Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya

Peralatan/Perlengkapan:

Pencatatan dan Pendataan:

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara

		Pelaksana					ı		
No	Aktifitas	Rektor	Panitia	Penilai	Kemenag	Persyaratan/	Waktu	Output	Ket
		rtottoi	Lelang		rtomonag	Perlengkapan	vvanta	Output	
1	Pengajuan penghapusan	_				Daftar Sarpras,	1 bulan	Sk panitia	
	aset					Fisik rusak		penghapusan	
2	Meneliti dan					Surat pengantr	1 jam	Rekomendasi	
	merekomendasi					hasil penelitian		penghapusan	
	penghapusan		↓						

3	Memasukan dokumen lelang				Dokumen	1 hari	Daftar lelang	
4	Mengajukan penghapusan asset				Daftar Sarpras, Fisik rusak	1 bulan	Sk panitia penghapusan	
5	Meneliti dan merekomendasikan				Surat pengantr hasil penelitian	1 jam	Rekomendasi penghapusan	
6	Membentuk panitia lelang				Susunan panitia	1 hari	SKpanitia	
7	Membuat harga limit dan melapor	↓			Kondisi barang	1 hari	Daftar harga barang	
8	Mengajukan pelaksanaan lelang				Dokumen lelang	1 hari	Disetujui	
9	Meneliti dan menetapkan waktu lelang		•		Dokumen, daftar	30 hari	terlaksana	
10	Mengumumkan lelang				Daftar lelang	1 hari	Terlaksana	
11	Melaksanakan lelang			—			Terlaksana	
12	Membongkar dan mengangkut				Fisik barang			
13	Mengurangkan dari KIB							
14	Membuat laporan pelaksanaan lelang				Laporan, data			
15	Menerima laporan lelang				Laporan, data		diterima	



Nome	or SOP	000314006					
Tang	gal Pembuatan	25 April 2016					
Tang	gal Revisi	18 Juni 2021					
Tang	gal Efektif	1 Januari 2022					
Disal	nkan Oleh	Wakil Rektor Bidang					
		Administrasi Umum,					
		Perencanaan, dan Keuangan					
		Dr. Salma, M.Hi					
		•					
		NIP. 196905041994032003					

SOP PERBAIKAN DAN PERGANTIAN SARANA PRASARANA

Dasar Hukum:

- Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negari

Keterkaitan:

SOP Pengelolaan Sarana Prasarana

Peringatan:

Perbaikan oleh kontraktor dilakukan jika teknisi IAIN Manado tidak dapat memperbaiki kerusakan

Kualifikasi Pelaksana:

 Pejabat bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Form usulan perbaikan
- 2. Form ceklist perbaikan
- 3. Daftar biaya perbaikan/perawatan

- 1. Perawatan Rutin
- Gedung Kantor Pusat, Perpustakaan dan Gedung Ruang Kuliah Bersama, Pos satpam, jalan, trotoar, saluran air hujan, pagar dan lampu penerangan jalan.

		Pelak	sana		Mutu Buku		Ket
No	Aktifitas	Unit	Bagian Umum dan RT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan jadwal perbaikan			usulan perbaikan	30 Menit	Daftar jadwal perbaikan	
2	Mengedarkan jadwal perbaikan sarana prasarana	\Box		Daftar jadwal	10 Menit		
3	Pengiriman permohonan perbaikan		\Box	Surat permohonan perbaikan	10 menit	Surat permohonan perbaikan di setujui	
4	Menyiapkan formulir perbaikan/pergantian sarpras		—	Form ceklist perbaikan /pergantian	20 Menit	Formulir perbaikan sarpras	
5	Mengecek ke lapangan			usulan perbaikan	30 Menit	Daftar jadwal perbaikan	

6	Menghitung kerusakan dan biaya	•		
7	Menerima laporan kebutuhan dana perbaikan pergantian sarpras	—		
8	Menyetujui anggaran perbaikan	•		
9	Pelaksanaan perbaikan			

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314007 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
		Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Dasar Hukum:

- Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
- Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Keterkaitan:

Keterkaitan

Koordinator bagian kebersihan dan kasubbag TU, Humas dan RT

Peringatan:

Peringatan

Jika masih ada area yang di anggap masih belum bersih maka disegerakan melakukan pembersihan ulang

Kualifikasi Pelaksana:

Minimal SMA Sederajat

Peralatan/Perlengkapan:

Peralatan/Perlengkapan

Alat-alat Kebersihan

Pencatatan dan Pendataan: Pencatatan dan Pendataan

Catatan Pengawas

		Pelaksana		Mutu Buku			
No	Aktifitas	Bagian Umum dan RT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
1	Membuka Ruang Kantor dan Ruang Kuliah	$ \leftarrow $		1 jam	Ruang Kantor dan Kuliah Terbuka		
2	Membersihkan ruangan sebelum jam kantor masuk	—		1 jam	Ruangan kantor Bersih		
3	Menyiapkan Prasarana Kerumahtanggaan	*		30 menit	Prasarana kerumahtanggan tersedia		
4	Membersihkan ruangan			1-2 jam	Ruang Kantor dan Ruang Kuliah Bersih		
5	Mengunci seluruh ruang kantor dan ruang kuliah			1 jam	Ruangan Terkunci		



Nomor SOP	000314008
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Colmo M Li
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

SOP SATUAN PENGAMANAN IAIN MANADO

Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi;
- 3. PMA Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado

Keterkaitan:

Kepala Pengamana dan Kepala subbagian TU, Perengkapan dan RT

Peringatan:

Pengaman wajib dilkasankan 24 jam setiap harinya

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Minimal SMA Sederajat,
- Memiliki Sertifikat Pengamanan

Peralatan/Perlengkapan:

Alat-alat pengamanan

Pencatatan dan Pendataan:

Catatan Laporan pengmanan

		Pelak	sana		Mutu Buku		Ket
No	Aktifitas	Unit	Bagian Umum dan RT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan kegiatan pengamanan dan melaporkan rencana kegiatan pengamanan			Surat usulan pengamanan dan rencana kegiatan	2 jam	Draf rencana kegiatan pengamanan	
2	Memeriksa rencana kegiatan pengamanan dan memberi persetujuan			Draf rencana kegiatan pengamanan	30 Menit	Rencana pengamnanna yang sudah disetujui	
3	Melaksanakan rencana pengamanan dan menerima serta menindaklanjuti informasi mengenai keamanan			Rencana pengamnanna yang sudah disetujui	24 jam setiap hari	Terlaksannya pengamanan sesuai rencana	
4	Memantau pelaksanan pengamanan			Terlaksannya pengamanan sesuai rencana	10 menit	Catatan hasil pemantauan	
5	Melaksanakan pengamanan dan perbaikan sesuai catatan hasil pemantauan (jika ada)			Catatan hasil pemantauan	10 menit	Perbaikan perencanaan pengamanan	
6	Membuat laporan harian pengamanan	•		Pelaksanaan pengamanan		Laporan harian	
7	Selesai						



Nomor SOP	000314009
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	-
	Du Colmo MIII
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

SOP MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Dasar Hukum:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
- 4. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama.

Keterkaitan:

SOP Simpeg

SOP Naik Pangkat

Peringatan:

Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pegawai yang akan naik gaji berkalanya akan terhambat, dan berpengaruhi terhadap kelengkapan kenaikan pangkat.

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai Kemampuan dan pengetahuan tentang kenaikan Gaji Berkala

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari arsip, Filleng Kabinet, ATŔ

- Buku kendali KGB
 Draft SK KGB

			Pelal	sana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengecek daftar Pegawai yang akan naik gaji berkala di buku kendali KGB dan menyiapkan bahan kenaikan gaji berkala tersebut					1. SK Capeg 2. SK KGB terakhir, 3. SK Pangkat terakhir;	5 menit	Kelengkapan berkas pembuatan KGB	
2	Membuatkan draft SK Kenaikan Gaji Berkala					SK KGB terakhir SK Pangkat terakhir	10 menit	Draft SK Kenaikan Gaji Berkala	
3	Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala					Draft SK Kenaikan Gaji Berkala	5 menit	Draft SK Kenaikan Gaji Berkala	
4	Memaraf draft SK Kenaikan Gaji Berkala oleh Kabag OKH					Draft SK Kenaikan Gaji Berkala	5 menit	Draft SK Kenaikan Gaji Berkala sudah benar	
5	Menjadi Draft SK tersebut menjadi SK Kenaikan Gaji Berkala					SK Kenaikan Gaji Berkala	20 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala	
6	Memaraf SK Kenaikan Gaji Berkala yang siap di siap ditanda tangani oleh Rektor	•				SK Kenaikan Gaji Berkala	10 menit	SK Kenaikan Gaji Berkala	
7	Mendistribusikan SK Kenaikan Gaji Berkala dan mengarsipkannya di filling kabinet yang bersangkutan					SK Kenaikan Gaji Berkala	10 menit	SK KGB terdistribusi dan terarsipkan	



Nomor SOP	000314010
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	,
	NIP. 196905041994032003

SOP PEMBUATAN KARTU ISTRI (KARIS)/KARTU SUAMI (KARSU)

Dasar Hukum:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- SE BAKN Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu PNS Keputusan Kep. BAKN Nomor 115 a/Kep/1983 tentang Kartu
- Isteri/Kartu Suami PNS

Keterkaitan:

SOP Simpeg SOP Data Base Kepegawaian

Peringatan:

Jika pegawai tidak mengajukan Kartu Istri/Kartu Suami, pegawai tidak akan mendapat Kartu Istri/Kartu Suami

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Kartu Isteri/Kartu Suami

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, ATK dan Sarana Transportasi

- 1. Surat Pengantar
- 2. Kartu Istri/Kartu Suami

			Pelal	ksana		N	1utu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat dan mengoreksi berkas persyaratah permohonan usul Kartu Isteri/Kartu Suami dari masing-masing unit kerja yang telah diberikan disposisi oleh Kepala Bagian					1. Laporan perkawinan dari yang bersangkutan 2. Fotocopy sah SK Capeg, SK PNS dan SK terakhir 3. Fotocopy sah surat nikah 4. Fotocopy sah kartu keluarga	5 menit	Berkas persyaratan	
2	Membuatkan Draft surat pengantar usulan Kartu Isteri/Kartu Suami yang ditujukan ke BKN Regional VIII Banjarmasin					Draft surat pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	
3	Mengoreksi dan memaraf Draft surat pengantar Kartu Isteri/Kartu Suami					Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Draft Surat pengantar dan berkas persyaratan	
4	Memprint Draft surat pengantar menjadi surat pengantar yang siap ditandatangani oleh pimpinan					Surat Pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Surat pengantar dan berkas persyaratan	
5	Memaraf surat pengantar permintaan Kartu Isteri dan Kartu Suami		-			Surat Pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Surat Pengantar dan berkas persyaratan	
6	Menandatangani surat pengantar permintaan Kartu Isteri/Kartu Suami					Surat pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Surat pengantar dan berkas persyaratan	

7	Mengantar dan mengambil berkas usulan permintaan Kartu Isteri/Kartu Suami ke BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru			surat pengantar dan berkas persyaratannya	3 minggu	Kartu Isteri/Kartu Suami	
8	Mengcopy, menyerahkan Kartu Isteri/kartu Suami kepada pegawai yang bersangkutan dan mengarsipkanya di filling kabinet pegawai yang bersangkutan			Kartu Isteri/kartu Suami	5 menit	Terdistribusi dan terarsipnya Kartu Isteri/Kartu Suami	

The Manager

Nomor SOP	000314011
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP 196905041994032003

SOP MUTASI PEGAWAI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
 3. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural

Keterkaitan:

- 1. SOP BAPERJAKAT
- 2. SOP Pelantikan Pejabat
- 3. SOP Pemutakhiran Database Kepegawaian

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan mutasi akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang Mutasi Pegawai

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

Buku kendali

			Pelal	ksana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima memo atau berita acara hasil rapat BAPERJAKAT					Memo atau berita acara hasil rapat BAPERJAKAT	15 menit	Memo dan berita acara hasil rapat BAPERJAKAT	
2	Menyiapkan konsep SK Mutasi				-	Memo atau berita acara hasil rapat BAPERJAKAT	60 menit	Konsep SK	
3	Mengoreksi Konsep SK Mutasi					Konsep SK Mutasi	15 menit	Konsep SK	
4	Menelaah konsep SK Mutasi				\neg	Konsep SK Mutasi	15 menit	Konsep SK	
5	Mencetak SK Mutasi					Konsep SK Mutasi	15 menit	SK Mutasi	
6	Memberi paraf dan memintakan tanda tangan Rektor					SK Mutasi	15 menit	SK Mutasi sudah ditanda tangani	
7	Memberi nomor, menggandakan dan mendistribusikan SK Mutasi					SK Mutasi	30 menit	SK Mutasi terdistribusi	



Nomor SOP	000314012
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 190903041994032003

SOP PENETAPAN ANGKA KREDIT DOSEN

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan MENPAN-RB No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013
- tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Keterkaitan:

- 1. SOP SIMPEG
- 2. SOP Mutasi
- 3. SOP SAPK
- 4. SOP SKP

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan permohonan penetapan angka kredit,

- 1. Kenaikan Pangkat / Jabatan akan terkendala dan tidak lancar
- 2. Dalam waktu lama, PNS yang bersangkutan bisa dibebastugaskan dari jabatan fungsionalnya.

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penetapan angka kredit dosen

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, Box File

- 1. Surat Permohonan
- 2. Draft Penetapan Angka Kredit Dosen

			Pelal	ksana		N	/lutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan					Surat permohonan Berkas Penetapan angka kredit	20 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan mengagendakan permohonan penetapan angka kredit					Berkas permohonan penetapan angka kredit	20 menit	Teragendanya permohonan penetapan angka kredit	
3	Memeriksa kelayakan permohonan penetapan angka kredit untuk diagendakan dalam sidang penetapan angka kredit					Berkas permohonan penetapan angka kredit	20 menit	Berkas layak / tidak dibawa ke sidang penetapan angka kredit	
4	Mengetik konsep penetapan angka kredit yang telah disetujui dalam sidang					Berita acara hasil sidang	15 menit	Konsep penetapan angka kredit	
5	Memeriksa dan memaraf konsep penetapan angka kredit					Konsep penetapan angka kredit	15 menit	Konsep penetapan angka kredit	

7	Mencetak peneta angka kredit dan paraf ke Kabag Memaraf Peneta angka kredit untu selanjutnya minta tangan Rektor	meminta pan ık			kredit	apan angka apan angka	10 me	angka kredit sudah diparaf
8	Pemberian nomo digandakan, dist didistribusikan se tujuannya	empel dan			Penet kredit	apan angka	20 me	nit Penetapan angka kredit terdistribusi dan terarsipkan
			 	 NDONESIA N) MANAD		Nomor SOP Tanggal Pemb Tanggal Revis Tanggal Efekti Disahkan Olef	i f	000314013 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PENERBITAN SK PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Keterkaitan:

- 1. SOP SIMPEG
- 2. SOP Tugas Belajar
- SOP Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Dosen
 SOP Penetapan Angka Kredit Dosen

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penerbitan SK Pengangkatan kembali menjadi terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, jaringan internet, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

1. Buku Kendali

			Pelal	ksana		M	lutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membaca surat permohonan, memo / disposisi pimpinan					1. Surat Permohonan 2. Ijazah 3. Transkrip Nilai	15 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan membuat konsep SK Pengangkatan Kembali					Surat Permohonan dan kelengkapannya	15 menit	Konsep SK Pengangkatan Kembali	
3	Menelaah konsep SK Pengangkatan kembali sekaligus memarafnya					Konsep SK dan berkasnya	15 menit	Konsep SK sudah ditelaah dan diparaf	
4	Memeriksa konsep SK sekaligus memarafnya					Konsep SK dan berkasnya	10 menit	Konsep SK sudah diperiksa dan diparaf	
5	Mencetak SK Pengangkatan Kembali dan memintakan paraf Kabag					Konsep SK	15 menit	SK sudah diparaf Kabag dan selanjutnya meminta paraf Kepala Biro	
6	Memaraf SK Pengangkatan Kembali dan siap ditandatangani Rektor					SK Pengangkatan Kembali	15 menit	SK Sudah diparaf	

7	Meminta tanda tangan Rektor		SK Pengangkatan Kembali	15 menit	SK sudah ditandatangani	
8	SK diberi nomor, digandakan, distempel dan didistribusikan sesuai tujuannya		SK Pengangkatan Kembali	20 menit	SK terdistribusikan dan terarsipkan	

		Nomor SOP	000314014
		Tanggal Pembuatan	25 April 2016
		Tanggal Revisi	18 Juni 2021
^		Tanggal Efektif	1 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		Administrasi Umum,
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO		Perencanaan, dan Keuangan
CIA MANAGE			
			Dr. Salma, M.Hi
			NIP. 196905041994032003
			1411. 1000000 1100 1002000

SOP PENERBITAN SK PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013; 5. Keputusan Menteri Agama No. 175 Tahun 2010.

Keterkaitan:

- 1. SOP SIMPEG
- 2. SOP Tugas Belajar

Peringatan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penerbitan SK Pembebasan Sementara menjadi terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Peraturan dan Persyaratan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Dosen

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, printer, jaringan internet, ATK, lemari arsip

Pencatatan dan Pendataan:

1. Buku Kendali

			Pelal	ksana		N	1utu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menelaah SK Tugas Belajar					SK Tugas belajar yang berlaku setelah 6 bulan dari tanggal diterbitkan	15 menit	SK Pembebasan sementara bisa diterbitkan	
2	Menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara			_		SK Tugas Belajar	15 menit	Konsep SK	
3	Menelaah dan memaraf konsep SK Pembebasan					SK Tugas Belajar	10 menit	Konsep SK sudah ditelaah dan diparaf	
4	Memeriksa konsep dan memaraf SK Pembebasan Sementara					SK Tugas Belajar	10 menit	Konsep SK sudah diperiksa dan diparaf	
5	Mencetak SK Pembebasan Sementara dan meminta paraf Kabag					SK Tugas Belajar	15 menit	SK sudah diparaf Kabag dan selanjutnya meminta paraf Kepala Biro	
6	Memaraf SK Pembebasan Sementara dan siap ditandatangani Rektor					SK Pembebasan Sementara	15 menit	SK sudah diparaf	
7	Meminta tanda tangan Rektor					SK Pembebasan Sementara	15 menit	SK sudah ditandatangani	

	8	SK diberi nomor, digandakan, distempel dan			SK Pembebasan Sementara	15 menit	SK terdistribusikan	
		didistribusikan sesuai					dan terarsipkan	
1		tujuannya						l

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembu Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi
		NIP. 196905041994032003

SOP PENCATATAN SURAT MASUK

Dasar Hukum:

PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Kementerian Agama

Keterkaitan:

- 1. SOP Mutasi,
- 2. SOP Penerbitan SK
- 3. SOP Surat Tugas
- 4. SOP Pengusulan Tugas dan Izin Belajar,
- 5. SOP Usulan Pensiun,6. SOP Pembuatan KARIS/KARSU, KARPEG

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka surat masuk tidak dapat dideteksi sampai dimana prosesnya.

Kualifikasi Pelaksana:

Memahami tata cara pencatatan kartu kendali dan surat masuk

Peralatan/Perlengkapan:
Meja, Kursi, Buku, Pulpen, Penggaris, Corection pen/tip. X, Penjepit Kertas, Business file/map surat masuk

- 1. Buku Agenda Surat Masuk
- 2. Kartu Kendali
- 3. Lembar disposisi

			Pelaks	ana	N	1utu Buku		
No	Aktifitas	Kabag Kasubbag Kepeg & JFU/JFT Hukum		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Mencatat surat masuk di buku agenda dan diserahkan kepada Kepala Bagian OKH				Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Lembar Disposisi	5 menit	Surat Masuk	
2	Membaca Surat Masuk dan memberikan disposisi kepada Kasubbag yang terkait untuk di tindak lanjuti	*			surat masuk dan lembar disposisi	10 menit	surat masuk dan disposisi	
3	Mendistribusikan surat masuk kepada kepala Sub Bagian OKH				surat masuk dan lembar disposisi	10 menit	surat masuk dan lembar disposisi	
4	Membaca surat masuk yang telah diberikan disposisi pimpinan kemudian memberikan arahan kepada JFU untuk melaksanakan				surat masuk dan lembar disposisi	5 menit	surat masuk dan lembar disposisi	
5	Tindak lanjt disposisi pimpinan				surat masuk dan disposisi pimpinan	20 menit	Dokumen SK Kepegawaian yang telah dilegalisir	



Nomor SOP	000314016
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 190903041994032003

SOP DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 Peraturan MENPAN-RB No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala
- 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Keterkaitan:

- 1. SOP SIMPEG
- 2. SOP Mutasi
- 3. SOP SAPK
- 4. SOP SKP
- 5. SOP Penetapan Angka Kredit

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan permohonan usulan penetapan angka kredit, maka :

- 1. Kenaikan Pangkat / Jabatan akan terkendala dan tidak lancar;
- 2. Dalam waktu lama, PNS yang bersangkutan bisa dibebastugaskan dari jabatan fungsionalnya.

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan pengusulan penetapan angka kredit dosen

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, Lemari arsip

- 1. Surat Permohonan
- 2. Draft Usulan Penetapan Angka Kredit Dosen

			Pelal	ksana		M	utu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ke t
1	Menerima, membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan					Surat permohonan Berkas usulan penetapan angka kredit	15 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan mengagendakan permohonan usulan penetapan angka kredit					Berkas permohonan usulan penetapan angka kredit	15 menit	Teragendanya permohonan usulan penetapan angka kredit	
3	Memeriksa kelayakan permohonan usulan penetapan angka kredit untuk diagendakan dalam sidang penetapan angka kredit					Berkas usulan permohonan penetapan angka kredit	15 menit	Berkas layak / tidak dibawa ke sidang penetapan angka kredit	
4	Mengetik konsep permohonan usulan penetapan angka kredit					Berita acara hasil sidang	15 menit	Konsep usulan penetapan angka kredit	

	yang telah disetu sidang	ıjui dalam											
5	Memeriksa dan r konsep usulan p angka kredit								o usulan pan angka kredit	10 m	enit	Konsep usulan penetapan angka kredit telah diperiksa dan diparaf	
6	Mencetak usular penetapan angka	•							penetapan kredit	10 m	enit	Usulan penetapan angka kredit sudah ditandatangani Rektor	
7	Memintakan paraf ke Kabag untuk selanjutnya memintakan tanda tangan Rektor Pemberian nomor,								penetapan kredit		enit	Usulan penetapan angka kredit terdistribusi dan terarsipkan	
8									penetapan kredit	20 m	enit	Usulan penetapan angka kredit terdistribusi dan terarsipkan	
									Nomor SOP		0003	314017	
									Tanggal Pembuata	an	25 A	pril 2016	
								L	Tanggal Revisi		18 J	uni 2021	
								L	Tanggal Efektif			nuari 2022	
/		VENACA.	ITEDIAN A	CAMA DE	יו או אווי	IDONECI			Disahkan Oleh			il Rektor Bidang	
			—	. • ,,	EPUBLIK IN EGERI (IAII		-					ninistrasi Umum, encanaan, dan Keuangal	n
											Dr. S	Salma, M.Hi	

SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Dasar Hukum:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 3. SE BAKN Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu PNS

Keterkaitan:

- 1. SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS
- 2. SOP Simpeg

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan Kartu Pegawai, pegawai tersebut tidak akan mendapatkan kartu pegawai, dan kelengkapan persyaratan untuk naik pangkat menjadi tidak lengkap

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pembuatan kartu pegawai (Karpeg)

NIP. 196905041994032003

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, komputer, printer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, ATK dan Sarana Transportasi

- 1.Surat Pengantar
- 2. Kartu Pegawai (Karpeg)

			Pelal	ksana		Mu	ıtu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK Kabag Kasubag OKPP		JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Menerima surat dan mengoreksi berkas persyaratah permohonan usul Kartu Pegawai dari masing-masing unit kerja yang telah diberikan disposisi oleh Kepala Bagian					1. Fotocopy sah SK Capeg 2. Fotocopy sah SK PNS 3. Fotocopy sah STTPL (surat keterangan lulus pendidikan dan latihan) 4.Pas Foto ukuran 2 x 3 cm, 2 lembar	5 menit	Berkas persyaratan	
2	Membuatkan Draft surat pengantar usulan Kartu Pegawai yang ditujukan ke BKN Regional VIII Banjarmasin					Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Draft surat pengantar dan berkas persyaratannya	
3	Mengoreksi dan memaraf Draft surat pengantar Kartu Pegawai					Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	
4	Memprint Draft surat pengantar menjadi surat pengantar yang siap ditandatangani oleh pimpinan					surat pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Surat Pengantar dan berkas persyaratan	
5	Memaraf surat pengantar permintaan Kartu Pegawai (Karpeg)					Surat Pengantar dan berkas persyaratan	5 menit	Surat Pengantar dan berkas persyaratan	

6	Menandatangani surat pengantar permintaan Kartu Pegawai (Karpeg)			Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	
7	Mengantar dan mengambil berkas usulan permintaan Kartu Pegawai (Karpeg) ke BKN Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru			Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	3 Minggu	Kartu Pegawai (Karpeg)	
8	Mengcopy, menyerahkan Kartu Pegawai (Karpeg) kepada pegawai yang bersangkutan dan mengarsipkanya di filling kabinet pegawai yang bersangkutan			Kartu Pegawai (Karpeg)	5 menit	Terdistribusi dan terarsipnya Kartu Pegawai (Karpeg)	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314018 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi
		NIP. 196905041994032003

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEGIATAN

Dasar Hukum:

- Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Keterkaitan:

Penerbitan Keputusan Rektor peraturan Penerbitan Keputusan Rektor Pedoman

Peringatan:

keterlambatan penerbitan Keputusan Rektor akan menghambat terlaksana

Kualifikasi Pelaksana: SLTA, S1

Peralatan/Perlengkapan:
Meja, Kursi,Kertas, Pulpen,Pensil,Komputer, Printer, Penghapus

- 1.Surat Pengantar 2. Kartu Pegawai (Karpeg)

			Pelal	ksana			Mutu B	uku	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	menerima permohonan penerbitan Keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan/pengelolaan dari fakultas/unit-unit kerja					Surat permohonan dari Fakultas/Unit- unit kerja	3 menit	Terdistribusinya permohonan penerbitan keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan dari unit-unit kerja/Fakultas-fakultas	
2	Menerima permohonan penerbitan Keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan dari Fakultas/Unit-unit kerja					Surat permohonan dari Fakultas/unit- unit kerja	3 menit	Terinventarisasinya dan terdistribusinya permohonan keputusan rektor berkaitan dengan kegiatan	
3	Menerima permohonan penebitan keputusan rektor berkaitan dengan kegiatan dari unit-unit kerja/Fakultas-fakultas					Surat permohonan penerbitan keputusan Rektor	3 menit	Terinventarisasinya dan terprosesnya draf keputusan rektor	
4	Membuat/mengetik draf keputusan rektor					draf keputusan Rektor	2 hari	Terbuatnya draf keputusan Rektor	
5	Mengoreksi dan memaraf draf Keputusan Rektor					draf keputusan Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnnya draf keputusan Rektor	
6	Mengoreksi dan memaraf draf keputusan Rektor					draf Keputusan Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnya draf keputusan Rektor	

7	Mengoreksi dan memaraf draf keputusan Rektor			draf Keputusn Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnya draf keputusan Rektor	
8	Menjadikan draf Keputusan Rektor menjadi keputusan Rektor			Keputusan Rektoryang siap untuk ditandatangani pimpinan	10 menit		
9	Memaraf Keputusan Rektor yang siap ditadatangani pimpinan						
10	Menggandakan, menditribusikan Keputusan Rektor kepada pihak terkait ,mengarsipkan			Keputusan Rektor yang sudah ditandatangani Rektor	15 menit	Terdistribusinya dan terarsipnya keputusan Rektor	

25

Nomor SOP	000314019
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	_
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

SOP MUTASI ANTAR INSTANSI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
- 3. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

Keterkaitan:

- SOP Mutasi Pegawai
 SOP Pemutakhiran Database Kepegawaian

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan mutasi antar instansi akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang Mutasi Antar Instansi

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

Buku kendali

	Aktifitas		Pelal	ksana		Mutu Buku			
No		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima memo / surat disposisi pimpinan					1. SK CPNS 2. SK PNS 3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 4. SK Jabatan terakhir 5. KARPEG 6. DP3 2 tahun terakhir 7. Kenaikan Gaji Berkala 8. Pernyataan persetujuan menerima dari instansi yang dituju 9. Daftar Riwayat Hidup 10. Surat-surat Pernyataan	15 menit	Memo / disposisi pimpinan	
2	Menelaah dan mempelajari memo / disposisi pimpinan					Memo, disposisi pimpinan dan berkas kelengkapan mutasi	30 menit	Memo / disposisi pimpinan	
3	Menyiapkan konsep Persetujuan Mutasi					Memo beserta berkas kelengkapan mutasi	15 menit	Konsep persetujuan mutasi	
4	Mengoreksi konsep persetujuan mutasi					Konsep persetujuan mutasi	10 menit	Konsep persetujuan mutasi	

5	Menelaah konsep surat persetujuan mutasi	-		Konsep surat persetujuan mutasi	15 menit	Konsep surat persetujuan mutasi	
6	Mencetak surat persetujuan mutasi dan menyiapkan surat pengantar mutasi ke instansi yang dituju			Konsep surat persetujuan mutasi dan pengantar mutasi	10 menit	Surat Persetujuan Mutasi dan Surat Pengantar Mutasi ke instansi yang dituju	
7	Memberi paraf dan memintakan tanda tangan Rektor			Surat Persetujuan Mutasi dan Surat Pengantar Mutasi Antar Instansi	15 menit	Surat Persetujuan dan Pengantar Mutasi sudah ditandatangani	
8	Memberi nomor, menggandakan dan mendistribusikan Surat Persetujuan dan surat pengantar Mutasi kepada yang bersangkutan dan instansi yang dituju			Surat Persetujuan dan surat pengantar mutasi	30 menit	Surat Persetujuan dan surat pengantar Mutasi terdistribusi	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314020 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003
			NIP. 196905041994032003

SOP MUTASI KENAIKAN PANGKAT

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 3. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- 4. PP Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
- 5. KMA Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Dep. Agama

Keterkaitan:

- 1. SOP Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)
- 2. SOP Data Base Kepegawaian
- 3. SOP Ujian Dinas/UPKP
- 4. SOP Penilaian Angka Kredit

Peringatan:

- 1. Berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses
- 2. Apabila salah satu syarat perlengkapan tidak dipenuhi, akan menghambat proses pengusulan naik pangkat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang kenaikan pangkat

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, Internet, Sarana Transportasi, ATK, Faximile, dan Telepon

- 1. Rekapitulasi daftar pegawai yang akan naik pangkat
- Surat Pengantar
- 3. Nota usul naik pangkat
- 4. Persetujuan BKN
- 5. SK naik pangkat

			Pelal	ksana		Mu	tu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuatkan daftar Pegawai yang akan naik pangkat dan memberitahukan kepada pegawai yang akan naik pangkat untuk menyiapkan berkas naik pangkat					1. Fotocopy sah SK Capeg dan PNS 2. Fotocopy sah SK pangkat terakhir 3. Fotocopy sah Sk Jabatan terakhir 4. Fotocopy sah Karpeg dan KGB terakhir 5. Fotocopy sah DP3 /SKP 2 tahun terakhir 6. Lulus Ujian Dinas/UPKP bagi Peg. Gol. II Ke Gol.III	5 menit	Berkas naik Pangkat	

_		ı	1			T	
				7. Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pegawai fungsional 8. STTPP, Surat Pelantikan, SPMT dan SPMJ bagi pejabat struktural 9. DUK dan daftar Riwayat Hidup (Bagi Pegawai Gol. III/d ke atas)			
2	Menerima surat dan mengoreksi berkas persyaratan usul naik pangkat dari masing- masing unit kerja yang telah di disposisi oleh Kepala Bagian			Berkas kenaikan pangkat	10 menit	Berkas kenaikan Pangkat	
3	Membuatkan Draft surat pengantar nota usul naik pangkat bagi pegawai Gol. III/d Ke atas yang ditujukan ke Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta, dan mengentry data pegawai naik pangkat di aplikasi SAPK bagi Pegawai Gol. III/d ke bawah			Draft surat pengantar nota usul naik pangkat dan berkas kelengkapannya	60 menit	Draft surat pengantar nota usul naik pangkat dan berkas kelengkapan	
4	Mengoreksi dan memaraf Draft surat pengantar nota usul naik pangkat			Draft surat pengantar nota usul naik pangkat dan berkas kelengkapannya	5 menit	Draft surat pengantar nota usul naik pangkat dan berkas kelengkapan	
5	Memprint surat pengantar nota usul naik pangkat untuk pegawai Gol.III/d keatas secara manual , sedangkan pegawai Gol. III/d kebawah melalui aplikasi SAPK yang disiap ditandatangani oleh pimpinan			Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	10 menit	Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan berkas kelengkapan	
6	Mengoreksi surat pengantar nota usul naik pangkat yang siap ditandatangani oleh pimpinan			Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	5 menit	Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	
7	Memaraf surat pengantar nota usul naik pangkat yang siap ditandatangani oleh pimpinan			Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	5 menit	Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	
8	Mengantar nota usul naik pangkat beserta berkasnya dan mengambil nota persetujuan ke BKN Regional VIII Banjarmasin ke Banjarbaru bagi Pegawai Gol. III/d ke bawah, serta mengirimkan berkas naik pangkat ke Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta untuk Pegawai Gol. III/d ke atas			Surat Pengantar Nota usul naik pangkat dan kelengkapan berkasnya	BKN 4 minggu Sekjen 3 bulan	Persetujuan BKN	
9	Memprint SK naik pangkat berdasarkan persetujuan BKN melalui Aplikasi SAPK bagi Pegawai Gol. III/d ke bawah yang siap ditandatangani oleh pimpinan			SK naik pangkat	60 menit	SK naik pangkat	
10	Menerima,mengcopy, dan mendistribusikan Sk naik pangkat kepada pegawai yang bersangkutan dan unit kerja terkait, serta mengarsipkannya			SK naik pangkat	5 menit	SK naik pangkat	



Nomor SOP	000314021
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 190900041994032003

SOP PELANTIKAN PEJABAT

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2001, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
- 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 4. Keputusan Menteri Agama No. 350 Tahun 1998 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen

Agama Keterkaitan:

- 1. SOP Baperjakat
- 2. SOP Mutasi Pegawai

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pelantikan pejabat akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang pelantikan pejabat

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, ATK, Filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

SK Promosi Jabatan

	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Buku			
No		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima memo pimpinan terkait pelantikan					Berita acara hasil rapat BAPERJAKAT	15 menit	Memo dan berita acara	
2	Menyiapkan konsep undangan untuk saksi, rohaniawan, pembaca doa, pejabat yang akan dilantik dan tamu undangan serta menyiapkan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan					SK Mutasi Pejabat dan buku kontrol	90 menit	Konsep Undangan dan Berita Acara Pelantikan	
3	Mengoreksi undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan					Konsep undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	30 menit	Konsep undangan, berita acara pelantikan dan serah terima	

4	Menelaah konsep Undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan dan memarafnya			Konsep undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	15 menit	jabatan sudah dikoreksi dan diparaf Konsep undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan sudah ditelaah dan diparaf	
5	Mencetak undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan			Konsep undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	20 menit	Undangan, berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	
6	Menandatangani undangan pelantikan			Undangan pelantikan		Undangan pelantikan sudah ditandatangani	
7	Memberi nomor, menggandakan dan mendistribusikan undangan pelantikan serta Meiyappan susunan acara, akomodasi dan konsumsi pelantikan			Undangan pelantikan	90 menit	Terdistribusinya undangan dan pelantikan siap untuk dilaksanakan	
8	Melaksanakan pelantikan			SK Mutasi Pejabat, berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	150 menit	Pejabat baru sudah dilantik	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Ke	
	Dr. Salma, M.Hi NIP. 1969050419940	032003

SOP PEMBERIAN CUTI

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera
 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 3. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
 4. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
 5. SE BAKN Nomor 01/SE/1977 tenttang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di lingkungan Dep. Agama
 6. SE Sekjen Depag Nomor 6 Tahun 1988, tentang Juklak Pelaksaan
- Cuti PNS

Keterkaitan:

1. SOP Absensi Pegawai

Peringatan:

Pegawai yang tidak melaksanakan proses cuti dianggap tidak masuk tanpa ijin

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang cuti

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, ruang, komputer, Printer, Lemari Arsip, Filleng Kabinet,

- surat cuti
 Kartu Kemdali cuti

			Pelal	ksana			Muti	u Buku	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pegawai meminta blanko cuti ke Sub Bagian Ortala					Blanko cuti	5 menit	Blanko cuti diserahkan ke Pegawai	
2	Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permohonan cuti ke atasan langsung					Blanko cuti yang telah terisi	5 menit	Surat Permohonan cuti	
3	Atasan langsung menelaah surat permohonan cuti dan memberikan catatan pertimbangan pada surat pengajuan cuti tersebut					Surat Permohonan cuti	30 menit	Surat permohonan cuti telah diberikan catatan	
4	Meneruskan surat permohonan cuti ke pejabat yang berwenang memberikan cuti					surat permohonan cuti	10 menit	Draft surat cuti	

5	Deighet your herwanens				Droft ourst iiin	30	ourst iiin suti	
3	Pejabat yang berwenang yang memberikan cuti				Draft surat ijin cuti	menit	surat ijin cuti	
	memberikan putusan dan							
	menandatangani surat cuti	1						
6	Menyampaikan surat cuti				Surat cuti	30	Surat cuti sudah diberikan	
	yang sudah ditandatangani					menit	disposisi oleh Kepala Biro	
	kepada pegawai yang							
	bersangkutan dan Rektor sebagai tembusan							
7	Menerima surat cuti yang				surat cuti	10	surat cuti yang sudah	
•	sudah diberi disposisi oleh		_			menit	diberikan diposisi oleh	
	Kepala Biro AUAK						Kabag OKH dan diterima	
				<u> </u>			oleh subbag ortala	
8	Menerima surat cuti yang				 surat cuti	10	surat cuti siap dicatat di	
	telah diberi disposisi oleh					menit	buku kendali cuti dan	
	Kepala Bagian untuk dikendalikan di buku kendali						diarsipkan	
	cuti, dan memberitahukan							
	kepada kasubbag							
	Kepegawaian sebagai							
	bahan absensi pegawai							
	serta diarsipkan							
9	Mengarsipkan surat cuti ke				surat cuti	5	surat cuti terarsipkan	
	dalam filling kabinet cuti				1	menit		

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314023 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003
--	---	--	---

SOP PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Dasar Hukum:

Perauran Pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda dan jasa tanda kehormatan

Keterkaitan:

- 1. SOP Seleksi Tanda Kehomatan Satyalancana Karya Satya
- 2. SOP Pengusulam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Peringatan:
Pegawai yang tidak melaksanakan proses cuti dianggap tidak masuk tanpa ijin

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai pengetahuan tentang pemberian tanda kehoramatan satyalancana karya satya

Peralatan/Perlengkapan:

Meja,kursi,kertas,pulpen, pensil, komputer,printer dan penghapus

- 1. surat cuti
- 2. Kartu Kemdali cuti

			Pelal	ksana			Mut	u Buku	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Surat Keputusan Presiden RI penganugerahan Satya Lancana Karya Satya					Keputusan Presiden	1 hari	Keputusan Presiden	
2	Membuat surat pemanggilan kepada pimpinan Fakultas dan Unit-unit kerja untuk disampaikan kepada penerima Satya Lancana untuk disampaikan kepada yang dianugerahkan satya lancana untuk menerima pada saat HAB Kementerian Agama atau 17 Agustus					Keputusan Presiden	1 hari	Menerima tanda Kehormatan Satyalancana	
3	Gladi bersih sebelum upacara					keputusan presiden	30 menit	menerima tanda kehormatan satya lancana	
4	Tanda kehormatan dianugerahkan kepada PNS					Keputusan presiden	1 jam	penganugerahan tanda kehormatan diterima oleh yang bersangkutan	

oleh presiden diwakili oleh				
menteri atau Rektor				



Nomor SOP	000314024
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	_
	Dr. Colmo M Hi
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

SOP PEMBUATAN SPMT DAN SPMJ FUNGSIONAL

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sistem Negara 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN
- 3. PMA Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- 4. Peraturan Kepala BKN No. 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Keterkaitan:

1. SOP mutasi kenaikan pangkat

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tunjangan fungsional tidak akan dibayar

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pembuatan SPMT dan SPMJ jabatan fungsional

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari Arsip dan ATK

Pencatatan dan Pendataan:

SK Fungsional SPMT dan SPMJ

			Pelal	sana			Mutu B	uku	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima, dan membaca surat permohonan dibuatkan SPMT dan SPMJ dari masing-masing unit, yang telah diberi disposisi oleh kabag OKH					Berkas permohonan yang dilampiri SK Pengankatan sebagai tenaga Fungsional/ SK Fungsional terbaru	5 menit	Berkas permohonan dan SK Pengangkatan sebagai jabatan fungsional/SK fungsional terbaru	
2	Membuatkan Draft SPMT dan SPMJ jabatan fungsional					Berkas permohonan yang dilampiri SK Pengankatan sebagai tenaga Fungsional/ SK Fungsional terbaru	10 menit	Berkas permohonan yang dilampiri SK Pengankatan sebagai tenaga Fungsional/ SK Fungsional terbaru	

draft SPMT dan jabatan fungsion 4 Menerima Draft SPMJ yang telal dikoreksi, terus r nomor dan mem kembali SPMT d yang siap ditand oleh pimpinan 5 Mengoreksi SPM SPMJ yang siap	SPMT dan n nemberi print an SPMJ atangani // dan				SPMT		10 menit	serta berkas persyaratannya SPMT dan SPMJ SPMT dan SPMJ	
ditandatangani o pimpinan 6 Memaraf SPMT yang siap ditand oleh pimpinan	dan SPMJ				SPMT	dan SPMJ	10 menit	SPMT dan SPMJ	
7 Menerima kemb dan SPMJ yang ditandatangani p	telah				SPMT	dan SPMJ	5 menit	SPMT dan SPMJ	
8 Menggandakan SPMJ yang telal ditandatangani, mendistribusikar kepada yang bersangkutan da terkait	SPMT dan terus nnya				SPMT	dan SPMJ	10 menit	SPMT dan SPMJ sudah didistribusikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait	
CINCIL	KEMENTERIAI INSTITUT AGAN	-	_	-		Nomor SOP Tanggal Per Tanggal Rev Tanggal Efe Disahkan O	nbuatan ⁄isi ktif	000314025 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuanga	ın
		-	_	-					n Keuanga

SOP PEMBUATAN KARTU TASPEN

Dasar Hukum:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS;
- 4. PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- 5. PMA Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado.

Keterkaitan:

- SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS
 SOP Database Kepegawaian

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan Kartu Pegawai tidak akan mendapat kartu TASPEN

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pembuatan kartu Taspen

Peralatan/Perlengkapan:
Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, ATK dan Sarana Transportasi

- 1. Surat Pengajuan
- 2. Surat Pengantar
- 3. Kartu Taspen

			Pelal	ksana				Mutu B	uku	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JF	т-	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat dan mengoreksi berkas persyaratah permohonan usul Kartu Taspen dari masing-masing unit kerja yang telah diberikan disposisi oleh Kepala Bagian						1. Fotocopy SK CPNS 2. Fotocopy SK PNS 3. Fotocopy SPMT	5 menit	Surat Pengajuan beserta berkas persyaratannya	
2	Membuatkan Draft surat pengantar usulan Kartu Taspen yang ditujukan ke PT. Taspen Banjarmasin						Draft surat pengantar dan Berkas Persyaratan	10 menit	Draft Surat Pengantar dan berkasnya	

3	Mengoreksi dan memaraf Draft surat pengantar Kartu Taspen			Draft surat pengantar dan berkasnya	5 menit	Draft Surat Pengantar dan Berkasnya	
4	Memprint Draft surat pengantar menjadi surat pengantar yang siap ditandatangani oleh pimpinan			Surat Pengantar dan Berkasnya	5 menit	Surat Pengantar dan berkasnya	
5	Memaraf surat pengantar permintaan Kartu Taspen			Surat Pengantar dan Berkasnya	5 menit	Surat Pengantar dan Berkasnya	
6	Menandatangani surat pengantar permintaan Kartu Taspen			Surat Pengantar dan berkasnya	5 menit	Surat Pengantar dan Berkasnya	
7	Menyampaikan surat penganta dan berkas pengajuan ke PT Taspen Banjarmasin			Surat pengantar dan berkasnya	1 hari	Surat Pengantar dan Berkasnya	
8	Menerima Kartu Taspen dari PT Taspen dan menyerahkannya kepada pegawai yang bersangkutan			Kartu Taspen	1 hari	Kartu Taspen diterima pegawai yang bersangkutan	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314026 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003	
--	---	--	---	--

SOP PEMUTAKHIRAN DATABASE KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
 PMA Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 4. PMA 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri
- Antasari Banjarmasin

Keterkaitan:

- 1. SOP Mutasi Naik Pangkat
- 2. SOP Simpeg

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka data pegawai tidak akurat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai Kemampuan dan Pengetahuan tentang Penataan Databasé Kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

Database Kepegawaian

			Pelal	ksana		Mutu B	uku	
No	Aktifitas	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima fotocopy perubahan data kepegawaian dalam bentuk SK naik pangkat, SK pindah tugas, SK kenaikan jabatan dan SK pensiun yang telah diberikan disposisi oleh Kepala Bagian				Data perubahan pangkat, jabatan, mutasi dan pensiun	5 menit	Fotocopy SK naik pangkat, SK mutasi, SK kenaikan jabatan dan SK pensiun	
2	Menginput data terbaru dalam database kepegawaian				Fotocopy perubahan data kepegawaian	10 menit	Terinputnya data perubahan di database kepegawaian	
3	Memprint rekapitulasi perubahan data pegawai				Perubahan dara pegawai terinput ke database	20 menit	Rekapitulasi data pegawai	

4	Mengoreksi hasil print rekapitulasi perubahan data pegawai			Rekapitulasi data pegawai	10 menit	Rekapitulasi pegawai	
5	Menandatangani hasil rekapitulasi data pegawai terbaru			Rakapitulasi data pegawai	5 menit	Rekapitulasi data pegawai	
6	Memberikan rekapitulasi data kepegawaian terbaru kepada pimpinan			Rekapitulasi data pegawai	5 menit	Rekapitulasi Data Pegawai diterima pimpinan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pemb Tanggal Revis Tanggal Efekti Disahkan Olel	si 18 Juni 2021 tif 1 Januari 2022
		NIP. 196905041994032003

PENERBITAN SUAT TUGAS

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Keterkaitan:

- 1. SOP Simpeg
- 2. SOP Surat Perjalanan Dinas

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan permintaan penerbitan surat tugas, maka :

1. Perjalanan dinasnya melanggar disiplin, karena tidak masuk kerja; Tidak akan mendapat penggantian biaya perjalanan dinasnya

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan surat tugas

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, Box File

- 1.Surat Pengantar
- 2.Draft Surat Tugas

			Pela	ıksana			Mutu Bukı	ı	
No	Aktifitas	Kepala Biro	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket

1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan			1.Surat Permohonan 2.Surat undangan Surat panggilan	10 menit	surat permohonan dan lembar disposisi	
2	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan			berkas dan surat permohonan	15 menit	konsep surat tugas	
3	Memeriksa konsep surat tugas sekaligus memarafnya			Konsep surat tugas	10 menit	Konsep sudah diperiksa dan diparaf	
4	Menelaah dan memaraf konsep surat tugas			Konsep surat tugas	10 menit	Konsep surat tugas sudah diparaf	
5	Mencetak surat tugas dan memintakan paraf Kabag			Surat Tugas	15 menit	Surat tugas sudah diparaf	
6	Menandatangani surat tugas yang kewenangan penandatanganannya pada Kepala Biro, dan memaraf surat tugas yang kewenangan penandatanganannya ada pada Rektor			Surat Tugas	15 menit	Surat tugas sudah ditandatangani atau diparaf	
7	Meminta tanda tangan Rektor			Surat Tugas	15 menit	Surat tugas sudah ditandatangani	
8	Pemberian nomor, digandakan, di stempel dan didistribusikan sesuai tujuannya			Surat Tugas	30 menit	Surat terdistribusi dan terarsipkan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314028 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003
--	--	---

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN SERTIFIKASI DOSEN

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. Peraturan MENPAN-RB No.17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

Keterkaitan:

- SOP Database Pegawai
- SOP Penerbitan SPMT dan SPMJ Fungsional

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan sertifikasi Dosen tidak dapat diusulkan

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Kendali

			Pelal	ksana			Mutu Bukı	ı	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat permohonan diterbitkannya SK Penetapan Penerima Sertifikasi Dosen dari masing-masing unit kerja yang telah diberikan disposisi oleh Kepala Bagian					surat permohonan dari masing- masing Unit	5 menit	surat	

2	Menyiapkan konsep sk Penetapan Penerimaan Sertifkasi Dosen			-	Konsep SK Penetapan Penerimaan	10 menit	Konsep SK	
3	Memeriksa konsep dan memaraf Konsep SK Penetapan Sertifikasi dosen		-		Sertifikasi Dosen Konsep SK	15 menit	Konsep SK telah diperiksa dan diparaf	
4	Memprint SK Penetapan Penerimaan Serifikasi Dosen				Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	10 menit	SK Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	
5	Memaraf SK Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen				Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	10 menit	SK Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	
6	Mengoreksi SK Penetapan Penerima Sertifikasi Dosen yang siap ditandatangani pimpinan/Rektor				Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	15 menit	Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	
7	Memaraf SK Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen yang siap ditanda tangani pimpinan/rektor	-			Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	10 menit	Surat tugas sudah ditandatangani	
8	SK yang telah ditandatangani pimpin diberi nomor, digandakan, dan didistribusikan sesuai tujuannya				Sk Penetapan Penerimaan Sertifikasi Dosen	10 menit	Surat terdistribusi dan terarsipkan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314029 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
		Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PENERBITAN SK PENGANGKATAN CPNS

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

Keterkaitan:

SOP Database Pegawai

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pengangkatan CPNS menjadi batal

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan SK CPNS

Peralatan/Perlengkapan:

Persetujuan BKN , Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

3.Buku Kendali

			Pelak	sana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Persetujuan					Persetujuan	5 menit	Persetujuan	

	Pertimbangan Penetapan NIP CPNS dari BKN				Pertimbangan Penetapan NIP BKN		Pertimbangan Penetapan NIP BKN	
2	Menyiapkan konsep sk Pengangkatan CPNS sesuai dengan format BKN/Kemanag				Konsep SK Penagngkatan CPNS	10 menit	Konsep SK	
3	Memeriksa dan memaraf Konsep SK Penagngkatan CPNS		•		Konsep SK CPNS	15 menit	Konsep SK telah diperiksa dan diparaf	
4	Memprint SK Pengangkatan CPNS	-		-	Sk Penagngkatan CPNS	10 menit	Sk Pengangkatan CPNS	
5	Memaraf SK Pengangkatan CPNS				Sk Penagngkatan CPNS	10 menit	Sk Pengangkatan CPNS	
6	Mengoreksi SK Penngangkatan CPNS yang siap ditandatangani pimpinan/Rektor				Sk Penagngkatan CPNS	10 menit	Sk Pengangkatan CPNS	
7	Memaraf SK Pengangkatan CPNS yang siap ditanda tangani pimpinan/rektor				Sk Penagngkatan CPNS	10 menit	Sk Pengangkatan CPNS telah diparaf	
8	SK CPNS telah ditandatangani pimpin diberi nomor, digandakan, dan didistribusikan ke pegawai yang bersangkutan dan unit kerja terkait untuk proses gaji				Sk Pengkatan CPNS	15 menit	SK CPNS terdistribusikan dan terarsipkan	

Nomor SOP	000314030
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

PENERBITAN SK FUNGSIONAL DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan MENPAN-RB No.17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun
- 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

Keterkaitan:

- 1. SOP SIMPEG
- 2. SOP Penetapan Angka Kredit Dosen
- 3. SOP Kenaikan Pangkat

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penerbitan SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan Lektor akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan Lektor

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Kendali

			Pelal	sana		Mutu Buku			
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyiapkan konsep SK Fungsional Dosen Asisten Ahli dan Lektor					Penetapan Angka Kredit	15 menit	Konsep SK	

2	Menelaah dan memaraf konsep SK Fungsional Dosen				Konsep SK Fungsional dan Penetapan Angka Kredit	10 menit	Konsep SK telah ditelaah dan diparaf
3	Memeriksa konsep dan memaraf SK Fungsional Dosen		_		Konsep SK Fungsional dan Penetapan Angka Kredit	15 menit	Konsep SK telah diperiksa dan diparaf
4	Mencetak SK Fungsional Dosen dan meminta paraf Kabag				SK Fungsional Dosen	15 menit	Memaraf SK Fungsional Dosen untuk selanjutnya minta paraf Kepala Biro
5	Memaraf SK Fungsional Dosen dan siap ditandatangani Rektor	-			SK Fungsional Dosen	15 menit	SK sudah diparaf
6	Meminta tanda tangan Rektor			•	SK Fungsional Dosen	10 menit	SK Sudah ditandatangani
7	SK diberi nomor, digandakan, dan didistribusikan sesuai tujuannya				SK Fungsional Dosen	15 menit	SK terdistribusikan dan terarsipkan

	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	000314031 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
		Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PENERBITAN SK PENGANGKATAN PNS

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN

Keterkaitan:

- SOP Database Pegawai SOP Penerbitan SK Pengangkatan CPNS

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pengangkatan CPNS bisa menjadi batal

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan SK PNS

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet

Pencatatan dan Pendataan:

Buku Kendali

			Pelal	ksana					
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerma surat permohonan menjadi PNS dari masing- masing Unit dan melakukan verifikasi kelengkapan perseyaratannya					1. P.Copy SK CPNS 2. P.Copy SPMT 3. P.Copy STTPL 4. Surat Kesehatan 5. SKP 1 tahun	5 menit	surat permohonan dan lembar disposisi	

	T	I		bernilai baik			
2	Menyiapkan konsep sk Pengangkatan PNS			Konsep SK Penagngkatan PNS	10 menit	konsep surat tugas	
3	Memeriksa dan memaraf Konsep SK Penagngkatan PNS			Konsep SK PNS	15 menit	Konsep sudah diperiksa dan diparaf	
4	Memprint SK Pengangkatan PNS			Sk Penagngkatan PNS	10 menit	Konsep surat tugas sudah diparaf	
5	Memaraf SK Pengangkatan PNS			Sk Penagngkatan PNS	10 menit	Surat tugas sudah diparaf	
6	Mengoreksi SK Penngangkatan PNS yang siap ditandatangani Pimpinan/ Rektor			Sk Penagngkatan PNS	10 menit	Surat tugas sudah ditandatangani atau diparaf	
7	Memaraf SK Pengangkatan PNS yang siap ditanda tangani pimpinan/rektor			Sk Penagngkatan PNS	10 menit	Sk Pengangkatan PNS telah diparaf	
8	SK PNS telah ditandatangani pimpin diberi nomor, digandakan, dan didistribusikan Ke Pegawai yang bersangkutan, dan unit kerja terkait untuk proses gaji			Sk Pengkatan PNS	15 menit	SK PNS terdistribusikan dan terarsipkan	

		Nomor SOP	000314032
		Tanggal Pembuatan	25 April 2016
		Tanggal Revisi	18 Juni 2021
		Tanggal Efektif	1 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		Administrasi Umum,
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO		Perencanaan, dan Keuangan
CAN MANAGE			
			Dr. Salma, M.Hi
			NIP 196905041994032003

PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Keterkaitan:

- 1 SOP SIMPEG
- 2 SOP Surat Tugas

Peringatan:

- Jika Pegawai tidak mengajukan permintaan penerbitan surat perjalanan dinas, maka :
 - Perjalanan dinasnya melanggar disiplin, karena tidak masuk kerja;
 - Tidak akan mendapat penggantian biaya perjalanan dinasnya

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan penerbitan surat perjalanan dinas

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, Box File

- 1. Surat Pengantar
- 2. Draft Surat Perjalanan Dinas

			Pelal	ksana		Mutu Buku			
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan			-		1. Surat 2. permohonan 3. Surat Undangan 4. Surat Panggilan 5. Surat Tugas	10 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan membuat konsep surat perjalanan dinas					Berkas dan surat tugas	15 menit	Konsep surat perjalanan dinas	
3	Memeriksa konsep surat perjalanan dinas sekaligus memarafnya					Surat tugas dan konsep surat perjalanan dinas	10 menit	Konsep surat perjalanan dinas sudah diperiksa dan diparaf	
4	Menelaah dan memaraf konsep surat perjalanan dinas					Surat tugas dan konsep surat perjalanan dinas	15 menit	Konsep surat perjalanan dinas sudah ditelaah dan diparaf	
5	Mencetak surat perjalanan dinas dan memintakan paraf Kabag					Surat tugas dan surat perjalanan dinas	15 menit	Surat Perjalanan dinas sudah diparaf	
6	Menandatangani surat perjalanan dinas yang kewenangan penandatanganannya pada Kepala Biro, dan memaraf surat perjalanan dinas yang kewenangan penandatanganannya ada pada Rektor					Surat tugas dan surat perjalanan dinas	15 menit	Surat perjalanan dinas sudah ditandatangani atau diparaf	
7	Meminta tanda tangan Rektor dan Pejabat Pembuat Komitmen			Y		Surat tugas dan surat perjalanan dinas	20 menit	Surat perjalanan dinas sudah ditandatangani	
8	Pemberian nomor, digandakan, di stempel dan didistribusikan sesuai tujuannya					Surat tugas dan surat perjalanan dinas	20 menit	Surat perjalan dinas terdistribusi dan terarsipkan	



Nomor SOP	000314033
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Agama No. 502 Tahun 2003 tentang Penetapan Situs (Website) SIMPEG Departemen Agama
- 3. Keputusan Menteri Agama No. 503 Tahun 2003 tentang Penetapan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian sebagai Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama;
- 4. Keputusan Menteri Agama No. 504 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di lingkungan Departemen Agama;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

Keterkaitan:

- 1. SOP SAPK
- 2. SOP Mutasi
- 3. SOP Pensiun
- 4. SOP Database Kepegawaian

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan tentang pengelolaan SIMPEG

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, filling cabinet

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka data pegawai tidak akurat

Pencatatan dan Pendataan:

- 1. Buku kendali
- 2. Buku kontrol

	Pelaksana							
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima perubahan data Kepegawaian dalam bentuk SK kenaikan pangkat, SK mutasi, SK Pensiun, KGB, Penghargaan, Diklat dll.				SK Kenaikan pangkat, jabatan, mutasi, pensiun, KGB, penghargaan, diklat dll.	10 menit	Data perubahan pangkat, jabatan, mutasi, pensiun, KGB, diklat, penghargaan, dll.	
2	Menginput data terbaru ke dalam Aplikasi SIMPEG				Perubahan data kepegawaian	15 menit	Terinputnya data perubahan di Aplikasi SIMPEG	
3	Memonitor perubahan data pegawai secara berkala dan berkelanjutan				Data kepegawaian	30 menit	Termonitornya data pegawai	
4	Mencetak data pegawai secara berkala setiap ada perubahan			•	Data kepegawaian	10 menit	Data terbaru sudah dicetak	
5	Mengoreksi dan menandatangani hasil print out data terbaru				Data kepegawaian	15 menit	Sudah terbaru sudah dikoreksi dan ditandatangani	
6	Mengarsipkan data kepegawaian				Data kepegawaian	10 menit	Data terdokumentasika n	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor SOP	000314034
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	NIP. 196905041994032003

SOP PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sistem Negara
- 2. UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- 4. Peraturan Kepala BKN nomor: 20 Tahun 2008 tentang amanat kepada setiap satuan kerja yang mengelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan dan dipersyaratkan dalam mengelola, mengembangkan administrasi kepegawaian mengunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online

Keterkaitan:

- 1. SOP Mutasi Kenaikan Pangkat
- 2. SOP Pengusulan Pensiun
- 3. SOP Database Kepegawaian

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka usul naik pangkat dan pensiun pegawai menjadi terlambat karena datanya tidak akurat

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan SAPK

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Internet dan ATK

Pencatatan dan Pendataan:

1. Database kepegawaian

ſ	No	Aktifitas	Pelaksana	Mutu Buku	Ket
	110	Aktilitas	Felaksalla	I Wata Daka	Net

		1.		1	1	T	1	T	
		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas usul naik pangkat dan usul pensiun yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian					Berkas naik pangkat dan berkas pensiun	5 menit	Berkas naik pangkat dan berkas pensiun	
2	Menginput data pegawai yang akan naik pangkat dan pegawai yang akan pensiun di aplikasi SAPK dengan melakukan peremajaan data					Berkas naik pangkat dan berkas pensiun	30 menit	Berkas naik pangkat dan berkas pensiun	
3	Memprint data pegawai yang akan naik pangkat dalam bentuk nota usul naik pangkat dan data pegawai yang akan pensiun dalam bentuk surat pengantar dalam aplikasi SAPK					Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	30 menit	Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	
4	Mengoreksi print out nota usul naik pangkat dan surat pengantar pensiun					Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	5 menit	Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	
5	Memaraf hasil print out nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun		*			Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	5 menit	Nota usul naik pangkat dan surat pengantar usul pensiun	
6	Menandatangani Nota usuk naik pangkat dan SK naik pangkat serta surat pengantar usul pensiun	 				Nota usul dan SK naik pangkat	5 menit	Nota Usul Naik Pangkat dan SK naik pangkat serta surat pengantar usul pensiun	
7	Menerima SK Naik pangkat dan Sk Pensiun dan melakukan kembali peremajaan data pegawai di aplikasi SAPK apabila belum terubah					SK naik pangkat dan SK Pensiun	10 menit	SK naik pangkat dan SK Pensiun	
8	Meremajaan Data terbaru sudah dilakukan					Data Pegawai sudah teremajakan	10 menit	Data pegawai di SAPK sudah teremaja	



Nomor SOP	000314035
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003

SOP PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan

Keterkaitan:

1. SOP Seleksi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Peringatan:

Pengusulan Satyalancana Karya Satya tidak akan diproses apabila ada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai pengetahuan tentang Satyalancana Karya Satya

Peralatan/Perlengkapan:

Meja,kursi,kertas,pulpen, pensil, komputer,printer dan penghapus

Pencatatan dan Pendataan:

Meja, kursi, ruang, komputer, Printer, Lemari Arsip, Filleng Kabinet, dan ATK

			Pelal	ksana					
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat surat ke unit- unit kerja dan Fakultas tentang hasil seleksi Satya Lancana Karya					hasil Rapat pimpinan	1 hari	Terbuatnya surat hasil seleksi Satyalancana Karya Satya	

	Satya untuk diumumkan dan melengkapi berkas						
2	verifikasi pimpinan (paraf Kepala Bagian OKH)	—		surat hasil seleksi	10 menit	surat terverfikasi	
3	surat ditandatangani Pimpinan			surat hasil seleksi	10 menit	surat siap dikirim	
4	surat disampaikan ke unt- unit kerja dan Fakultas- fakultas			surat sudah ditandatangani	30 menit	surat terdistribusi	
5	Menerima berkas kelengkapan usulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya			Berkas kelengkapan	2 minggu	terinventarisasiny a berkas	
6	Menginfut data keaplikasi sesuai dengan berkas yang masuk			Aplikasi Satya lancana Karya satya	1 hari	Terinfut data yang diusulkan	
7	Membuat surat pengantar usulan satyalancana ke Kementerian Agama RI			Surat pengantar Kekementerian Agama RI	30 menit	Terbuatnya surat	
8	Surat diparaf pimpinan dan ditandatangani Rektor			Surat pengantar dan hasil infut data	30 menit	surat pengantar dan hasil infut data	
9	Usulan melalui aplikasi dikirim lewat e mail dan berkas dikirim lewat jasa pengiriman/diantar			Berkas, surat pengantar dan infut data	1 hari	terkirimnya data calon penerima satyalancana karya satya	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314036 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003
--	---	--	---

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN-PERATURAN DAN PEDOMAN-PEDOMAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan	Mempunyai pengetahuan tentang Pembuatan SK.
Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Keputusan Rektor tentang Kegiatan/Pengelolaan	Meja, Kursi, Kertas, Pulpen, Pensil, Komputer, Printer, Penghapus
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

			Pelak	sana			Mutu Buk	tu	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Peraturan- peraturan dan pedoman-					Lampiran draf peraturan/pedoman yang sudah	10 menit	Terdistribusianya permohonan penerbitan peraturan-	

	pedoman dari Wakil-wakil Rektor				disiapkan wakil Rektor		peraturan /pedoman- pedoman.	
2	Menerima permohonan penerbitan peraturan- peratura/Pedoman yang sudah didisposisi pimpinan				Draf peraturan- peraturan/Pedoman- pedoman yang sudah didisposisi pimpinan	10 menit	Terinventarisasinnya dan terdistribusinya permohonan penerbitan Keputusan Rektor mengenai peraturan dan pedoman	
3	Menerima permohonan penerbitan Keputusan Rektor tentang peraturan-peraturan Rektor/pedoman yang sudah didisposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan				Draf peraturan Rektor/pedoman- pedoman yang sudah didisposisi pimpinan		Terinventarisasi dan terprosesnya draf keputusan Rektor menyangkut peraturan- peraturan/pedoman- pedoman	
4	Membuat/mengetik draf keputusan Rektor			_	Draf peraturan Rektor	2 hari	Terbuatnya draf keputusan Rektor	
5	Mengoreksi dan memaraf draf Keputusan Rektor tentang peraturan- peraturan/pedoman		•		Draf Keputusan Rektor	10 menit	Terkoreksinya draf Keputusan Rektor	
6	Mengoreksi dan memaraf draf Keputusan Rektor tentang peraturan- peraturan/pedoman- pedoman				Draf Keputusan Rektor	10 menit	Terkoreksinya draf Keputusan Rektor	
7	Mengoreksi dan memaraf draf Keputusan Rektor				Draf Keputusan Rektor	10 menit	Terkoreksinya draf keputusan Rektor	
8	Draf yang sudah dikoreksi pimpinan diperbaiki dan dicetak menjadi Keputusan Rektor untuk ditandatangani Rektor				Keputusan Rektor yang siap untuk ditandatangani pimpinan	15 menit	Keputusan Rektor siap diparaf pimpinan dan ditandatagani Rektor	
9	Memaraf keputusan Rektor yang siap ditandatangani Rektor	—			Keputusan Rektor siap ditandatangani Rektor	5 menit	Keputusan Rektor ditandatangani Rektor	
10	Menggandakan,mendistrib usika nKeputusan Rektor kepada pihak terkait dan diarsipkan				Keputusan Rektor yang sudah ditandatangani Rektor	15 menit	Terdistribusinya dan terarsipnya Keputusan Rektor menyangkut Peraturan- peraturan/pedoman- pedoman	



Nomor SOP	000314037
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 190903041994032003

SOP PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT IZIN BELAJAR S2 DAN S3

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2.Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 3.Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar bagi PNS di

Lingkungan Kementerian Agama

- 4. Surat Edaran MENPAN No. 18 Tahun 2004 tentang
- Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS

Keterkaitan:

- SOP SIMPEG
- SOP SAPK
- SOP SKP
- SOP Surat Keluar Kepegawaian

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan izin belajar, maka ijazah tidak diakui secara kedinasan

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan pengusulan izin belajar

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet, sarana transportasi

- 4.Surat Pengantar
- 5.Draft Permohonan Izin Belajar

No Aktifitas Pelaksana Mutu Buku
--

		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan					1. F.Copy SK CPNS 2. F,Copy SK PNS 3. F.Copy SK Terak. 4. DP3 / SKP 5. Surat Perjanjian untuk Mengabdi setelah selesai studi 6. Srt. Keterangan 7. Srt. Rekomendasi atasan langsung 8. Srt. Pernyataan Jadwal kuliah	10 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan membuat konsep surat				_		15 menit	Konsep surat
3	Memeriksa konsep surat sekaligus memarafnya					Konsep surat	15 menit	Konsep surat sudah diperiksa dan diparaf
4	Menelaah dan memaraf konsep					Konsep surat	10 menit	Konsep surat sudah diparaf
5	Mencetak surat dan memintakan paraf Kabag					Surat	15 menit	Surat sudah diparaf
6	Memaraf surat permohonan izin belajar dan siap ditandatangani Rektor					Surat	15 menit	Surat sudah diparaf
7	Meminta tanda tangan Rektor			-		Surat	10 menit	Surat sudah ditandatangani
8	Surat diberi nomor, digandakan, di stempel dan didistribusikan sesuai tujuannya					Surat Permohonan Izin Belajar	15 menit	surat terdistribusikan dan terarsipkan

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314038 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003
--	---	--	---

SOP PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT TUGAS BELAJAR S2 DAN S3

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama
- Surat Edaran MENPAN No. 18 Tahun 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS

Keterkaitan:

SOP SIMPEG

SOP SAPK

SOP SKP

SOP Surat Keluar Kepegawaian

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan permintaan penerbitan surat tugas, Jika Pegawai tidak mengajukan Tugas Belajar, maka ijazah tidak diakui secara kedinasan

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan pengusulan tugas belajar

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet, sarana transportasi

Pencatatan dan Pendataan:

Surat Pengantar

			Pelal	sana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan					1. Fotocopy SK CPNS 2. Fotocopy SK PNS 3. Fotocopy SK Terakhir	15 menit	Surat Permohonan dan lembar disposisi	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan membuat konsep surat			↓	-	Berkas permohonan	15 menit	konsep surat	
3	Memeriksa konsep surat sekaligus memarafnya					Konsep surat	15 menit	Konsep sudah diperiksa dan diparaf	
4	Memaraf dan menelaah konsep					Konsep surat	10 menit	Konsep surat tugas sudah diparaf	
5	Mencetak surat, memintakan paraf Kasubbag dan Kabag					Surat	30 menit	Konsep Surat sudah diperiksa dan diparaf	
6	Memaraf surat permohonan tugas belajar yang siap ditandatangani Rektor					Surat	10 menit	Surat sudah diparaf	
7	Meminta tanda tangan Rektor					Surat	10 menit	Surat sudah ditandatangani Rektor	
8	Surat diberi nomor, digandakan, distempel dan didistribusikan sesuai tujuannya					Surat Permohonan Tugas Belajar	15 menit	Surat terdistribusikan dan terarsipkan	

		Tangg	r SOP al Pembuatan al Revisi al Efektif	000314039 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022
25	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Disahk	kan Oleh	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
				Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PELAYANAN LEGALISIR SK-SK KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- 4. PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
- 5. PMA 37 Tahun 2017 tentang IAIN Manado.

Keterkaitan:

- SOP Mutasi Kenaikan Pangkat
- SOP Pengusulan Pensiun
- SOP Pembuatan Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)
- SOP Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG)

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka persyaratan kelengkapan kenaikan pangkat, pengajuan pensiun, perbuatan Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) dan pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) tidak akan diproses.

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang legalisiran

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang, Bak Stempel, Stempel, Stempel tanggal dan Tinta stempel

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen SK Kepegawaian

			Pelak	sana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima, menstempel, memberi tanggal legalisir berkas fotocopy dokumen SK kepegawaian yang masuk dari Pemohon di yang akan melegalisir					Fotocopy Dokumen SK Kepegawaian	5 menit	Dokumen SK Kpegawaian	
2	Memaraf berkas legalisiran dokumen SK Kepegawaian					Dokumen SK Kepegawaian	5 menit	Dokumen SK Kepegawaian	
3	Menandatangani berkas legalisir dokumen SK Kepegawaian					Dokumen SK Kepegawaian	5 menit	Dokumen SK Kepegawaian	
4	Menstempel legalisirian tersebut dengan stempel instansi IAIN Antasari, dan menyerahkannya kepada pihak yaang minta dilegalisir					Dokumen SK Kepegawaian yang telah dilegalisir	5 menit	Dokumen SK Kepegawaian yang telah dilegalisir	

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314040 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003	
--	---	--	---	--

SOP REKAPITULASI ABSEN BULANAN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
Undang-undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mempunyai pengetahuan untuk merekap absen dalam bentuk excel
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Meja,Kursi,Kertas,Pulpen, Pensil, Komputer,Printer dan
	Penghapus
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

		Pelaksana			Mutu Buku			
No	Aktifitas	Kasubb ag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Menerima absen apel bulanan dari unit kerja dan fakultas-fakultas			absen hadir apel bulanan	5 menit	terinventarisasi absen bulan dari unit kerja dan fakultas-fakultas		
2	input data absen apel bulanan ke dalam aplikasi absen			absen apel bulanan	1 jam	terinfut data absen bulanan dari unit kerja dan fakultas- fakultas		

3	data fisik absen diarsip			absen apel bulanan	10	terasipnya data	
			,		menit	absen apel bulanan	i

	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	000314041 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Joannan Gion	Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
		Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP SELEKSI PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 20 tahun 2009 tentang belar,tanda jasa dan tanda kehormatan

Keterkaitan:

SOP Absensi Pegawai SOP Data Base Kepegawaian

Peringatan:

Apabila tidak diadakan seleksi dikhawatirkan PNS yang tidak memenuhi kreteria berdasarkan undang-undang akan diberikan penghargaan

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai pengetahuan tentang Satya Lancana Karya Satya

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, kertas, pulpen,pensil,komputer, printer,penghapus

			Pelak	sana			Mutu Buku		
No	Aktifitas	Wakil Rektor Bid. Adm. Umum,P	Kepala Biro AUAK	Kepala Bagian Umum	Kasubb ag OKPP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket

		Keuang an					
1	Menerima surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI tentang Usul tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	G.:		Surat tentang usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI		Terdistribusi dan disposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti	
2	Menerima surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI tentang Usul tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang telah diberi disposisi dari Kepala Biro AUAK			Surat tentang usul tanda kehormatan satyalancanan karya satya dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI	5 menit	Terinventarisasi dan terdistribusinya surat tentang Usul tanda kehormatan Satyalancana karya satya untuk ditindaklanjuti	
3	Menerima surat tentang usul tanda kehormatan satyalancana karya satya dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, membuat surat berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk disampaikan ke pada unit-unit kerja dan Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Manado			Surat usul tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Kementerain Agama RI dan Surat untuk Fakultas dan Unit- unit kerja	2 hari	ditindaklajuti	
4	membuat surat ke Unit- unit kerja dan Fakulta- fakultas			Surat tentang ketentuan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya ke Fakultas dan Unit-unit kerja	2 hari	ditindaklanjuti oleh Fakultas dan Unit- unit kerja	
5	Menerima data usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dari Fakultas- Fakultas dan Unit kerja			Surat dan data usulan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	1 bulan	ditindaklanjuti	
6	Melakukan inventarisasi dan verifiikasi data			surat data usulan penerima tanda kehormatan Satyalancna Karya Satya	3 hari	terinventarisasi dan terverifikasi data	
7	Rapat pimpinan seleksi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya berdasarkan kreteria			data sudah diinpentarisasi dan sudah diverifikasi	1,5 jam	terseleksinya calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	



Nomor SOP	000314042
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	_
	Du Colmo Milli
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
1	

PENERBITAN SK IZIN BELAJAR S1

Dasar Hukum:

- 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2.PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 3..PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 4.Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama
- 5.Surat Edaran MENPAN No. 18 Tahun 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS

Keterkaitan:

SOP SIMPEG

SOP SAPK

SOP SKP

SOP Surat Keluar Kepegawaian

Peringatan:

Jika Pegawai tidak mengajukan izin belajar, maka ijazah tidak diakui secara kedinasan

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peraturan dan persyaratan izin belajar

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, kursi, komputer, printer, jaringan internet, ATK, filling cabinet, sarana transportasi

Pencatatan dan Pendataan:

6.Surat Pengantar

7.Draft SK Izin Belajar

No	Aktifitas	Pelaksana	Mutu Buku	Ket
INO	Aktilitas	Felansaria	IVIULU DUKU	r.ei

		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membaca surat permohonan dan disposisi pimpinan					1. Fotocopy SK CPNS 2. Fotocopy SK PNS 3. Fotocopy SK Terakhir	10 menit	Surat permohonan dan lembar disposisi
2	Memeriksa berkas kelengkapan dan membuat konsep SK					Berkas permohonan	15 menit	Konsep SK
3	Memeriksa konsep SK sekaligus memarafnya					Konsep SK	10 menit	Konsep SK sudah diperiksa dan diparaf
4	Menelaah dan memaraf konsep SK					Konsep SK	15 menit	Konsep sudah diparaf
5	Mencetak SK dan memintakan paraf Kabag					SK	15 menit	SK sudah diparaf
6	Memaraf SK Izin Belajar dan siap ditandatangani Rektor			—		SK	15 menit	SK sudah diparaf
7	Meminta tanda tangan Rektor					SK	10 menit	SK sudah ditanda tangani
8	SK diberi nomor, digandakan, di stempel dan didistribusikan sesuai tujuannya					SK Izin Belajar	20 menit	SK terdistribusikan dan terarsip

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM/PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

1. Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado. Keterkaitan: SOP Penerbitan Keputusan Rektor peraturan SOP Penerbitan Keputusan Rektor Pedoman Peringatan: keterlambatan penerbitan Keputusan Rektor akan menghambat terlaksana

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pela	aksana:
SLTA, S1	
Peralatan/Perle	engkapan:
Meja, Kursi,Kertas	s, Pulpen,Pensil,Komputer, Printer, Penghapus
Pencatatan dar	n Pendataan:

		Pelaksana			Mutu Buku				1	
No	Aktifitas	Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	

1	menerima permohonan penerbitan Keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan/pengelolaan dari unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas dan diberi disposisi				Surat permohonan dari Unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas	3 menit	Terdistribusinya permohonan penerbitan keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan dari unit- unit kerja/Fakultas- fakultas	
2	Menerima permohonan penerbitan Keputusan Rektor berkaitan dengan kegiatan/pengelolaan dari Unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas dan diberi disposisi		V .		Surat permohonan dari unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas	3 menit	Terinventarisasiny a dan terdistribusinya permohonan keputusan rektor berkaitan dengan kegiatan	
3	Menerima permohonan penebitan keputusan rektor berkaitan dengan kegiatan dari unit-unit kerja dan Fakultasfakultas dan sudah didisposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti				Surat permohonan penerbitan keputusan Rektor dari unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas	3 menit	Terinventarisasiny a dan terprosesnya draf keputusan rektor	
4	Membuat/mengetik draf keputusan rektor				Surat permohonan penerbitan Keputusan Rektor dari unit-unit kerja dan Fakultas- fakultas	2 hari	Terbuatnya draf keputusan Rektor	
5	Mengoreksi dan memaraf draf Keputusan Rektor				draf keputusan Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnnya draf keputusan Rektor	
6	Mengoreksi dan memaraf draf keputusan Rektor				draf Keputusan Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnya draf keputusan Rektor	
7	Mengoreksi dan memaraf draf keputusan Rektor	· ·			draf Keputusn Rektor	5 menit	Terkoreksinya dan terparafnya draf keputusan Rektor	
8	Draf yang sudah dikoreksi pimpinan dicetak/diperbaiki menjadi keputusan Rektor untuk ditandatangani Rektor				Keputusan Rektoryang siap untuk ditandatangani pimpinan	15 menit	Keputusan Rektor Siap diparaf pimpinan dan ditandatangani Rektor	
9	Memaraf Keputusan Rektor yang siap ditadatangani Rektor				Keputusan Rektor yang siap ditandatangani Rektor	5 menit	Keputusan Rektor ditandatangani Rektor	
10	Menggandakan, menditribusikan Keputusan Rektor kepada pihak terkait ,mengarsipkan				Keputusan Rektor yang sudah ditandatangani Rektor	15 menit	Terdistribusinya dan terarsipnya keputusan Rektor	



Nomor SOP	000314044
Tanggal Pembuatan	25 April 2016
Tanggal Revisi	18 Juni 2021
Tanggal Efektif	1 Januari 2022
Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	Administrasi Umum,
	Perencanaan, dan Keuangan
	Dr. Salma, M.Hi
	NIP. 196905041994032003
	NIF. 19090504 1994052005

SOP PENGAJUAN PENSIUN

Dasar Hukum:

- 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN
- 3. UU Nomor 11 Tahun 1968 tentang Pensiun PNS dan Janda/Dudanya
- 4. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
- 5. Surat Kep. BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun PNS

Keterkaitan:

SOP Simpeg

SOP Data Base Kepegawaian

Peringatan:

- 1. Berkas persyaratan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
- 2. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses pensiun

Kualifikasi Pelaksana:

Mempunyai kemampuan dan Pengetahuan tentang pensiun

Peralatan/Perlengkapan:

Meja. Kursi, Ruang, Komputer, Printer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, Sarana Transportasi, ATK, Telepon, Internet, Faximilile

- 1. Rekapitulasi daftar pegawai yang akan pensiun
- 2. surat pengantar
- 3. SK Pensiun

No	Aktifitas	Pelaksana	Mutu Buku	Ket

		Kepala Biro AUAK	Kabag Umum	Kasubag OKPP	JFU/JFT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memberitahukan kepada PNS yang akan mencapai BUP					1. DPCP (Data perorangan calon penerima pensiun) 2. Fotocoy sah SK Capeg, dan SK PNS 3. Fotocopy sah SK terakhir dan SK Jabatan terakhir 4. Fotocopy sah KGB terakhir 5. Fotocopy sah DP3 / SKP 2 tahun terakhir 6. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm, 5 lembar 7. Surat Penyataan tidak pernah di jatuhi hukum tingkat besar atau tingkat sedang selama 1 tahun terakhir 8. Fotocopy sah Karpeg, surat Nikah, Kartu Keluarga dan Karis/karsu 9. Fotocopy sah akte kelahiran anak 10. Daftar riwayat pekerjaan 11. Suratketerangan alamat pensiun	3 menit	Persyaratan berkas pensiun	
2	Menerima surat dan mengoreksi berkas persyaratan usul pensiun dari masing-masing unit kerja yang telah di disposisi oleh Kepala Bagian					Persyaratan berkas pensiun	3 menit	Persyaratan berkas pensiun	
3	Membuatkan Draft surat pengantar usul pensiun, untuk pegawai Gol. IV/b ke bawah ditujukan ke BKN Regional VIII Banjarmasin dengan menggunakan aplikasi SAPK,					Draft surat pengantar dan berkas persyaratannya	3 menit	Draft surat pengantar dan berkas persyaratan nya	
4	Mengoreksi dan memaraf Draft surat pengantar pensiun					Draft surat pengantar dan berkas persyaratannya	2 hari	Draft surat pengantar dan berkas persyaratan	
5	Memprint draft surat pengantar menjadi surat pengantar yang disiap ditandatangani oleh pimpinan					Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Surat pengantar dan berkas persyaratan nya	
6	Mengoreksi surat pengantar yang siap ditandatangani oleh pimpinan					Surat pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Surat pengantar dan berkas persyaratan nya	
7	Memaraf surat pengantar usul pensiun yang siap ditandatangani oleh pimpinan					Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	5 menit	Surat Pengantar dan berkas persyaratan nya	
8	Mengantar berkas pensiun dan mengambil SKnya ke BKN Regional VIII Banjarmasin ke Banjarbaru untuk Peg. Gol. IV/b ke bawah, mengirimkan berkas ke Sekjen Kementerian Agama RI					Surat Pengantar dan berkas persyaratannya	BKN 3 minggu Sekjen 5 bulan	SK Pensiun	

9	Menerima, Mengcopy, dan			Sk Pensiun	5 menit	SK Pensiun	
	menyerah Sk Pensiun					sudah	
	kepada pegawai yang					terdistribusi	
	bersangkutan serta					dan	
	mengarsipkannya					terarsipkan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Tangga Tangga	r SOP al Pembuatan al Revisi al Efektif kan Oleh	000314045 25 April 2016 18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
			Dr. Salma, M.Hi NIP. 196905041994032003

SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/I
- Penelaahan RKA K/L 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan
- Tahun Anggaran 2024 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Keterkaitan:

SOP TATA PERSURATAN BAGIAN UMUM

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip

Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

			Pelak	ksana		Mutu Buku			
No	Aktifitas	Panitia	KPA	UMUM	Keuang an	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memasukkan Surat Pengantar Permohonan					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, FC 2 Rangkap	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan	
2	Memasukkan Surat Penunjukkan Pelaksana Kegiatan (SPPK)					Materai, FC 2 Rangkap	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan	
3	Mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK)					Draft Panitia, Draft Peserta, Draft Narasumber, Draft Moderator	1 Hari	Draft Surat Keputusan (SK)	
4	Mengesahkan Surat Keputusan (SK)					Draft Panitia, Draft Peserta, Draft Narasumber, Draft Moderator	2 Hari	Surat Keputusan (SK)	
5	Membuat Daftar Honor Kegiatan					Honor Narasumber, Honor Moderator, Honor Uang Harian, Honor Transportasi	2 Jam	Daftar Honor Kegiatan	
6	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	2 Hari	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	
7	Mengantar Surat Permohonan ke Bagian Umum					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	1 Hari	Disposisi	
8	Proses Pencairan Anggaran/Kegiatan/Operasional Unit Kerja					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, SPPK, SPTJM	3 Hari	Pencairan Anggaran Kegiatan	

			Nomor SOP	000314046
			Tanggal Pembuatan	25 April 2016
		Ī	Tanggal Revisi	18 Juni 2021
			Tanggal Efektif	1 Januari 2022
			Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA			Administrasi Umum,
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO			Perencanaan, dan Keuangan
CALL SUSCESSION				
				Dr. Salma, M.Hi
				NIP. 196905041994032003

SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN OPERASIONAL FAKULTAS, UNIT DAN LEMBAGA

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
- 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Keterkaitan:

SOP TATA PERSURATAN BAGIAN UMUM

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 2. Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- 4. Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip

Peringatan:

- 1. Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

 2. Pencairan anggaran dibayarkan setelah memasukkan Laporan
- Pertanggung Jawaban periode sebelumnya

Pencatatan dan Pendataan:

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

		Pelaksana				Mutu Buku			
No	Aktifitas	FAK/UNI T/LEM	KPA	UMUM	Keuang an	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memasukkan Surat Pengantar Permohonan					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, FC 2 Rangkap	R/KAK Anggaran Kegiatan		
2	Memasukkan Surat Penunjukkan Pelaksana Kegiatan (SPPK)					Materai, FC 2 Rangkap	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan	
3	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	2 Hari	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	
4	Mengantar Surat Permohonan ke Bagian Umum					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	1 Hari	Disposisi	
5	Proses Pencairan Anggaran/Kegiatan/Operasional Unit Kerja					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, SPPK, SPTJM	3 Hari	Pencairan Anggaran Operasional	



SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN VAKASI

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
- 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 2. Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- 4. Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peringatan:

Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip

Pencatatan dan Pendataan:

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

		Pelaksana				N			
No	Aktifitas	Fakultas	KPA	UMUM	Keuang an	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memasukkan Surat Pengantar Permohonan					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, FC 2 Rangkap	airan, TOR/KAK Anggaran Kegiatan RAB Tahun		
2	Memasukkan Surat Penunjukkan Pelaksana Kegiatan (SPPK)			Materai, 2 Jam Dokumen Pencairan FC 2 Rangkap Anggaran Kegiatan					
3	Mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK)					Draft Penerima Vakasi	ma Vakasi 1 Hari Draft Surat Keputusan (SK)		
4	Mengumpulkan/merekap Surat Keputusan (SK) penerima Vakasi					Draft Penerima Vakasi 2 Hari Surat Keputusan (SK)			
5	Membuat Daftar Honor Penerima Vakasi					Daftar Honor Penerima Vakasi	2 Jam	Daftar Honor Penerima Vakasi	
6	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	2 Hari	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	
7	Mengantar Surat Permohonan ke Bagian Umum					Surat Permohonan Pencairan Anggaran	1 Hari	Disposisi	
8	Proses Pencairan Anggaran/Kegiatan/Operasional Unit Kerja					Surat Permohonan Pencairan, TOR/KAK dan RAB Tahun Berjalan, SPPK, SPTJM	3 Hari	Pencairan Anggaran Kegiatan	

		Nomor SOP	000314048
		Tanggal Pembuatan	25 April 2016
		Tanggal Revisi	18 Juni 2021
^		Tanggal Efektif	1 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		Administrasi Umum,
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO		Perencanaan, dan Keuangan
CHANNE MANAGE			
			Dr. Salma, M.Hi
			NIP. 196905041994032003

SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
- 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 2. Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- 4. Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peringatan:

Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip

Pencatatan dan Pendataan:

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Buku			
No		FAK/UNI T/LEM	PPK	UMUM	Keuang an	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat Surat Pengantar Permohonan	1	$\overline{}$			Surat Permohonan Pencairan, Nota atau Kwitansi Pemeliharaan kendaraan dinas	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
2	Mengajukan Nota atau Kwitansi Pemeliharaan Kendaraan dinas	Tidak		Ya		Nota atau Kwitansi Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang telah di TTD PPK	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
3	Mengantar Surat Permohonan ke Bagian Umum					Surat Permohonan Pencairan, Nota atau Kwitansi Pemeliharaan kendaraan dinas	1 Hari	Disposisi	
4	Proses Pencairan Anggaran/Kegiatan/Operasional Unit Kerja					Surat Permohonan Pencairan, Nota atau Kwitansi Pemeliharaan kendaraan dinas	3 Hari	Pencairan Anggaran Kegiatan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	18 Juni 2021 1 Januari 2022 Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Salma, M.Hi
		NIP. 196905041994032003

SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN PEMELIIHARAAN GEDUNG

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
- 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Aga<u>ma</u>

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 2. Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- 4. Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peringatan:

Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip

Pencatatan dan Pendataan:

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

		Pelaksana				Mutu Buku			
No	Aktifitas	FAK/UNI T/LEM PPK		UMUM Keuang an		Persyaratan/ Perlengkapan	, I Wakiii		Ket
1	Membuat Surat Pengantar Permohonan	1	$\overline{}$			Surat Permohonan Pencairan, Nota/Kwitansi/Invoice Pemeliharaan Gedung	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
2	Mengajukan Nota/Kwitansi/Invoice Pemeliharaan Gedung	Tidak		Ya		Nota/Kwitansi/Invoice Pemeliharaan Gedung	2 Jam	Dokumen Pencairan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
3	Mengantar Surat Permohonan ke Bagian Umum					Surat Permohonan Pencairan, Nota/Kwitansi/Invoice Pemeliharaan Gedung	1 Hari	Disposisi	
4	Proses Pencairan Anggaran/Kegiatan/Operasional Unit Kerja					Surat Permohonan Pencairan, Nota/Kwitansi/Invoice Pemeliharaan Gedung	3 Hari	Pencairan Anggaran Kegiatan	

		Nomor SOP	1	000314050
		Tanggal Pen	nbuatan	25 April 2016
		Tanggal Rev	/isi	18 Juni 2021
^		Tanggal Efek	ktif	1 Januari 2022
		Disahkan Ol	leh	Wakil Rektor Bidang
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA			Administrasi Umum,
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO			Perencanaan, dan Keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
CIA MANAGO				
				Dr. Salma, M.Hi
				NIP. 196905041994032003

SOP PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum:

- 1. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
- 2. PMA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
- 3. PMK No. 208/PMK.02/Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
- 4. PMK No. 49/PMK.02/Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- 5. KMA No. 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama
- 6. KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Aga<u>ma</u>

Keterkaitan:

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 2. Menguasai aplikasi Ms. Office (Word, Excel, Pdf Viewer/Editor)
- 3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Unit Kerja terkait
- 4. Memahami tata cara pemyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Peringatan:

Jika Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan tidak dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada, maka permohonan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Scanner, Lemari arsip **Pencatatan dan Pendataan:**

Berkas usulan Hardcopy 2 Rangkap dan Softcopy dalam bentuk Pdf

		Pelaksana				Mutu Buku			
No	Aktifitas	FAK/UNI T/LEM	PPK	UMUM	Keuang an	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat Surat Pengantar Permohonan					Surat Permohonan, lampirkan undangan (jika ada)	2 Jam	Dokumen Permohonan	
2	Mengantar surat permohonan ke bagian umum		· ·			Surat Permohonan, lampirkan undangan (jika ada)	2 Jam	Disposisi	
3	Melihat Anggaran yang terkait					Surat Permohonan, lampirkan undangan (jika ada)	1 Jam	Disposisi	
4	Pembuatan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)					Surat Permohonan, lampirkan undangan (jika ada)	2 Jam	Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	
5	Membuat Laporan Perjalanan Dinas					Surat Pengantar, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah di Tanda Tangani Tiket Pesawat dan Boarding, Bill Penginapan, Nota Transportasi (Rumah ke Bandara/Terminal/Stasiun PP dan Bandara/Terminal/Stasiun ke Lokasi PP) yang tidak melampaui SBM. 3. Memuat Dasar Pelaksanaan Kegiatan, Uraian Pelaksanaan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Manfaat bagi Institusi, kesimpulan dan dokumentasi kegiatan.	5 Hari	Laporan Perjalanan Dinas Dijilid dengan rapi	
6	Mengantar LPJ Perjalanan Dinas Ke Umum					Surat Pengantar dan Laporan Perjalanan Dinas	1 Hari	Disposisi	
7	Proses Pencairan Perjalanan Dinas berdasarkan bukti dan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM)					Surat Pengantar dan Laporan Perjalanan Dinas	3 Hari	Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas	